

**IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI  
PENGELOLAAN DANA PROGRAM KELUARGA HARAPAN  
(PKH) DALAM UPAYA MENINGKATKAN AKUNTABILITAS  
DITINJAU DARI PERSPEKTIF AKUNTANSI SYARIAH**

**(Studi pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat)**

**Skripsi**

**RAHMA FEBRIANTI**

**NPM: 1951030329**



**Program Studi Akuntansi Syariah  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1444 H / 2023 M**

**IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI  
AKUNTANSI PENGELOLAAN DANA PROGRAM  
KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM UPAYA  
MENINGKATKAN AKUNTABILITAS DITINJAU  
DARI PERSPEKTIF AKUNTANSI SYARIAH**

**(Studi pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat)**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



**Pembimbing I : Any Eliza, S.E., M.Ak**

**Pembimbing II : Yetri Martika Sari, S.E., M.Acc., Ak., C.A**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H / 2023 M**

## Abstrak

Dengan adanya Perubahan sistem penyaluran dana program keluarga harapan menjadi non tunai ternyata masih terjadi problematik terkait dengan penyaluran dana, yaitu masih adanya pemotongan dana, ketidaktepat sasaran penerima bantuan dan penyaluran dana yang tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menganalisis bagaimana sistem informasi akuntansi pengelolaan dana Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya meningkatkan akuntabilitas pada Dinas Sosial Lampung Barat dan bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana program keluarga harapan dalam perspektif Akuntansi Syariah pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat.

Teori yang digunakan adalah *Stewardship Theory*, dimana konsep teori ini berasumsi bahwa manusia pada hakikatnya mampu bertindak dengan penuh tanggungjawab, dapat dipercaya, berintegritas tinggi dan memiliki kejujuran. Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan karena peneliti langsung kelapangan, sifat penelitian yaitu pendekatan deskriptif kualitatif untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai penerapan sistem informasi akuntansi pengelolaan dana program keluarga harapan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik wawancara dan dokumentasi.

Elemen sistem informasi akuntansi belum seluruhnya terpenuhi yaitu pada proses penyaluran dana dimana dalam proses ini belum terdapat elemen *software* yang digunakan. Dengan implementasi sistem informasi akuntansi pengelolaan dana program keluarga harapan dapat meningkatkan akuntabilitas, yaitu ditunjukkan dengan tercapainya indikator akuntabilitas pada Dinas Sosial sebagai lembaga penyelenggara program keluarga harapan yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Akuntabilitas pengelolaan dana program keluarga harapan pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat telah sesuai dengan perspektif Islam yang dapat dilihat dengan tercapainya indikator akuntabilitas Islam.

**Kata kunci:** Program Keluarga Harapan, Sistem Informasi Akuntansi, Akuntabilitas

## ***Astract***

*With the change in the distribution system for the Family Hope program funds to non-cash, it turns out that there are still problems related to the distribution of funds, namely there are still funding cuts, the targeting of beneficiaries is not correct and the distribution of funds is not in accordance with the set schedule. The purpose of this research is to analyze how the accounting information system manages the Family Hope Program (PKH) funds in an effort to increase accountability at the West Lampung Social Service and how accountability manages the Hope Family Program funds in the perspective of Sharia Accounting at the West Lampung Regency Social Service.*

*The theory used is Stewardship Theory, where the concept of this theory is based on the principle of trust in those who are given authority, where management in an organization is reflected as a good steward who carries out the tasks given by his superiors with full responsibility. The research method used is a type of field research (Field Research), namely research conducted because the researcher is directly in the field, the nature of the research is a qualitative descriptive approach to get a clear picture of the implementation of the accounting information system for the management of the Hope Family Program funds. Data collection techniques used are interview and documentation techniques.*

*Elements of the accounting information system have not been fulfilled, namely in the process of channeling funds where in this process there is no software used. With the implementation of an accounting information system for the management of the family hope program funds, it can increase accountability, which is indicated by the achievement of accountability indicators at the Social Service as the organizer of the family hope program in West Lampung Regency. Accountability for the management of the Family Hope program funds at the West Lampung Regency Social Service is in accordance with an Islamic perspective which can be seen by the achievement of Islamic accountability indicators.*

***Keywords:*** Family Hope Program, Accounting Information System, Accountability



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Sekretariat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 704030*

---

**SURAT PERNYATAAN**

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rahma Febrianti

NPM : 1951030329

Prodi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Dana Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Akuntabilitas Ditinjau Dari Perspektif Akuntansi Syariah (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat)”** adalah benar-benar karya penyusun sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebutkan dalam catatan kaki atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Bandar Lampung, April 2023



**Rahma Febrianti**

**1951030329**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**Sekretariat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 704030**

**PERSETUJUAN**

**Judul : "Implementasi Sistem Informasi Akuntansi  
Pengelolaan Dana Program Keluarga Harapan  
(PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Akuntabilitas  
Ditinjau Dari Perspektif Akuntansi Syariah (Studi  
Pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat)"**

**Nama : Rahma Febrianti  
NPM : 1951030329  
Jurusan : Akuntansi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang  
Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan  
Lampung**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Any Eliza, S.E., M.Ak  
NIP. 198308152006042004**

**Yetri Martika Sari, S.E., M.Acc., Ak., C.A  
NIP. 198403282018012001**

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan Akuntansi Syariah**

**Ahmad Zuliansyah, S.Si., M.M  
NIP. 198302222009121003**



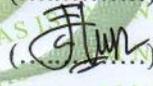
**KEMENTERIAN AGAMA  
 UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Sekretariat : Jl. Letkol.H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 704030*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Dana Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Akuntabilitas Ditinjau Dari Perspektif Akuntansi Syariah (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat)”** disusun oleh: **Rahma Febrianti, NPM. 1951030329**, Program Studi Akuntansi Syariah, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Selasa, 11 April 2023.**

**TIM PENGUJI:**

- Ketua Sidang : Ahmad Zuliansyah, M.M. 
- Sekretaris : Arifa Kurniawan, M.S.A 
- Penguji I : Muhammad Yusuf Bahtiar, M.E. 
- Penguji II : Yetri Martika Sari, M.Acc., C.A. 

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**Prof. Dr. Fulus Suryanto, SE., M.M, Akt, CA**  
 NIP. 1979009262008011008



## MOTTO

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرْ تَبَذِيرًا

[سورة الإسراء، ٢٦]

Artinya: *Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. (Q.S Al-Isra':26)*<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Special For Woman* (Bandung: PT Syigma Examedia Arkanleema, 2007), 284.

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa Syukur Kepada Allah SWT yang Maha pemberi segalanya berupa kebaikan dan dari hati yang terdalam, Skripsi ini penulis persembahkan:

1. Kepada kedua Orang tua tercinta, Mirzon dan Ida Wati yang selalu senantiasa memberikan do'a yang tulus dan ikhlas, kasih sayang, semangat yang tiada henti, motivasi, arahan, bimbingan dan inspirasi kepada penulis dalam menuntut ilmu. Terimakasih yang tak terhingga penulis ucapkan untuk kalian yang telah banyak pengorbanan, baik waktu maupun materi, karena kalian adalah alasan utama bagi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin.
2. Kepada kakakku tersayang Rahmat Rizqi Haristama dan adikku Riko Afriliansyah yang selalu memberikan keceriaan dan menjadi penyemangat bagi saya untuk dapat menyelesaikan pendidikan ini. Serta paman Solbintaron, S.IP dan bibi Fatmawati, S.Th.I., S.Pd. I juga seluruh kerabat keluarga besar berkat dukungan dan do'a-Nya mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik semoga Allah selalu senantiasa melindungi.
3. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung tempat penulis mengais ilmu-ilmu yang Rabbani semoga semakin jaya, berkualitas dan semakin di depan dengan nilai-nilai kebaikan.

## RIWAYAT HIDUP

Alhamdulillah penulis sangat bersyukur karena terlahir dan menjadi anak dari ayah Mirzon dan ibu Ida wati (orang tua yang sangat hebat dan mementingkan akan pendidikan anaknya), penulis dianugerahi nama yang sangat indah oleh kedua orang tua yaitu Rahma Febrianti. Dilahirkan di Buay Nyerupa, pada tanggal 28 Februari 2002. Anak ke 2 (dua) dari 3 (tiga) bersaudara (Rahmat Rizqi Haristama, Rahma Febrianti dan Riko Afriliansyah).

Riwayat pendidikan yang telah penulis selesaikan adalah: TK Bunda Chodijah pada tahun 2006-2007, melanjutkan pada SDN 3 Buay Nyerupa pada tahun 2007 dan selesai pada tahun 2013, kemudian tahun 2013 melanjutkan pendidikan di SMP Muhammadiyah 1 Sukau dan selesai pada tahun 2016, kemudian melanjutkan pendidikan di SMA N 1 Sukau Lampung Barat pada tahun 2016 dan selesai pada tahun 2019, dan Alhamdulillah pada tahun 2019 penulis bisa terus melanjutkan pendidikan strata 1 Prodi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN Raden Intan Lampung.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji Syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik, hidayah, dan karunia-Nya, tidak ada daya upaya maupun kekuatan kecuali hanya dari-Nya. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Rasul Muhammad SAW kepada para keluarganya yang suci, sahabatnya serta para pengikutnya yang Sholih. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Dana Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Akuntabilitas Ditinjau Dari Perspektif Akuntansi Syariah (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat)”** sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada Program Strata Satu (S1) Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) dalam bidang Ilmu Akuntansi Syariah.

Pelaksanaan dan penulisan skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Melalui kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E, MM. Akt, CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
3. Ahmad Zuliansyah, S.Si., M.M selaku ketua jurusan Akuntansi Syariah yang telah mendukung mahasiswanya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Any Eliza, S.E., M.Ak selaku Dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan terbaiknya serta dengan sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Yetri Martika Sari, S.E., M.Acc., Ak., C.A selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, arahan, masukan, serta

- motivasi yang sangat berarti bagi penulis.
6. Kepada seluruh Bapak dan Ibu dosen serta staff Program Studi Akuntansi Syariah yang telah memberikan ilmu dan bantuan selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
  7. Kepada seluruh staff akademik dan pegawai perpustakaan UIN Raden intan Lampung yang memberikan pelayanan baik dalam mencari referensi, data, serta informasi yang dibutuhkan oleh penulis.
  8. Bapak Jaimin, S.IP selaku kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat beserta jajarannya yang sudah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini.
  9. Bapak Ferry Istanto, S.E., MM selaku kepala bidang perlindungan dan jaminan sosial Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat yang memberi izin dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
  10. Ayah dan Ibu ku tercinta serta kakak dan adikku yang selalu ada memberikan semangat, dukungan, dan motivasi yang sangat berarti bagi saya.
  11. Kepada sahabat-sahabatku, yaitu Ayu Fransiska, Vena Antika, Yunarti Ulandari, Dika Fitria, Putri Lulu, Toni Efriyandika, Nelvia Widarti, Amelia Agustin, Lisa Nurmasari dan Yola Damitra. Terimakasih telah menjadi teman terbaik, yang selalu setia mendengarkan keluh kesah penulis, memberikan semangat dan kasih sayang kepada penulis.
  12. Teman-teman seperjuangan angkatan 2019 terkhusus Akuntansi Syariah D yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih kalian telah memberikan dorongan, semangat dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini dimanapun dan kapanpun jangan pernah putus silaturahmi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, akan tetapi diharapkan dapat memberikan manfaat keilmuan yang berarti dalam bidang Akuntansi Syariah bagi penulis maupun bagi para pembaca.

**Bandar Lampung, April 2023**  
**Penulis**

**Rahma Febrianti**  
**1951030329**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvii</b>



## BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang .....	3
C. Identifikasi Masalah .....	12
D. Fokus dan Sub Fokus Penelitian .....	12
E. Rumusan Masalah .....	13
F. Tujuan Penelitian .....	13
G. Manfaat Penelitian .....	13
H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	14
I. Metode Penelitian .....	20
J. Sistematika Pembahasan.....	26

## **BAB II LANDASAN TEORI**

A. <i>Stewardship Theory</i> .....	29
B. Akuntabilitas .....	30
C. Sistem Informasi Akuntansi .....	38
D. Program Keluarga Harapan.....	43

## **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Dinas Sosial .....	50
B. Penyajian Fakta dan Data Penelitian .....	52

## **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Dana Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Akuntabilitas Pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat .....	71
B. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Program Keluarga Harapan Dalam Perspektif Akuntansi Syariah pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat .....	99

## **BAB V PENUTUP**

A. Simpulan .....	104
B. Rekomendasi .....	105

## **DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

**Tabel 1. Data Perkembangan Peserta PKH .....7**

**Tabel 2. Elemen SIA dan Pengelolaan Dana PKH .....73**



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar1.1 Perkembangan Peserta PKH .....</b>	<b>44</b>
<b>Gambar 4.1 <i>Flowchart</i> Pendataan Masyarakat .....</b>	<b>83</b>
<b>Gambar 4.2 <i>Flowchart</i> Penyaluran Bantuan .....</b>	<b>85</b>
<b>Gambar 4.3 Laporan Pencairan PKH.....</b>	<b>90</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Pada kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas untuk mempermudah dan memperjelas pemaknaan terhadap judul skripsi, serta memberikan batasan terhadap arti kalimat dalam skripsi ini. Pemberian penegasan judul bertujuan agar pembaca memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud, serta menghindari dari kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, judul skripsi **“Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Dana Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Akuntabilitas Ditinjau Dari Perspektif Akuntansi Syariah (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat)”**.

Maka terlebih dahulu dijabarkan istilah-istilah penting yang terdapat pada judul skripsi ini.

#### 1. Implementasi

Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem, Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>2</sup>

#### 2. Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data untuk menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan. Sistem ini meliputi orang, prosedur dan instruksi, data, perangkat lunak, infrastruktur teknologi informasi, serta pengendalian internal dan ukuran keamanan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Usman Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Grasindo, 2012), 65.

<sup>3</sup> Marsall B. Romney, Paul John Steinbart, *Sistem Informasi Akuntansi* (Jakarta: Salemba Empat, 2020), 10.

### 3. Pengelolaan dana

Pengelolaan dana adalah proses pengelolaan penerimaan dan pengalokasian dana, pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi, pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.<sup>4</sup>

### 4. Program Keluarga Harapan

PKH merupakan salah satu program perlindungan sosial di Indonesia dalam bentuk bantuan sosial. Bantuan ini diberikan kepada keluarga miskin dan rentan miskin dengan persyaratan tertentu dimana mereka terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).<sup>5</sup>

### 5. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah suatu pertanggungjawaban atau menjawab kinerja yang harus diterapkan seorang pemimpin suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian penegasan diatas, bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah “Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Akuntabilitas Ditinjau dari Perspektif Akuntansi Syariah (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat)” adalah untuk mengetahui apakah Dinas Sosial telah menerapkan Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Dana Program Keluarga Harapan dengan baik dalam Upaya Meningkatkan Akuntabilitas.

---

<sup>4</sup> Sri Setiawati, "Evaluasi Prosedur Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Menilai Efektifitas Dana Pada Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Bina Auladi Depok," *Jurnal Lentera Akuntansi*, Vol. 4 No. 2 (2019): 65, <http://dx.doi.org/10.34127/jrakt.v4i2.304>.

<sup>5</sup> Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)* (Kementerian Sosial RI, 2021), 7.

<sup>6</sup> Rulfah M Daud Dkk, “Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Kabupaten Bireuen,” *JPAK: Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan*, Vol. 10 No. 2 (Juli-Desember 2022): 136, <https://doi.org/10.17509/jpak.v10i2.39913>.

## B. Latar Belakang

Tata kelola pemerintahan yang baik atau yang lebih dikenal dengan istilah *Good Governance* merupakan suatu pencapaian yang ingin diraih oleh suatu bangsa. Dalam hal ini, pemerintah harus mampu menyelenggarakan pemerintahan dengan bersih dan efektif. Salah satu pilar yang dibutuhkan guna terciptanya tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas.<sup>7</sup>

Akuntabilitas diartikan sebagai pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk menjalankan tugas tertentu kepada pihak pemberi mandat itu sebagai kewajiban pemegang amanah (pemerintah) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (masyarakat) yang memiliki hak untuk meminta tanggung jawab tersebut.<sup>8</sup>

Sedangkan Akuntabilitas menurut Nurlinda, adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.<sup>9</sup> Tujuan utama akuntabilitas ialah mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik sehingga meningkatkan kemampuan respons terhadap masyarakat yang dilayani. Disini masyarakat dijamin akan mendapatkan pelayanan sehingga mandat yang telah diberikan tidak sia-sia.

Islam memiliki perspektif tersendiri berkaitan tentang pertanggungjawaban karena dalam Islam semua yang dititipkan kepada manusia adalah amanah, konsep amanah merupakan

---

<sup>7</sup> Syeni Rakhmadani, "Akuntabilitas Pelayanan Publik: Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Di Era Digital," *Jurnal STISIPOL Dharma Wacana Metro*, (2017): 98, <http://digilib.mercubuana.ac.id/>.

<sup>8</sup> Mohammad Khafid Laili, Agustin Fadjarenie, "Pengaruh Sosialisasi Informasi SAK ETAP Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan," *Al-Mal: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, Vol. 2 No. 1 (2021): 56, <https://doi.org/10.24042/al-mal.v2i01.7687>.

<sup>9</sup> Nurlinda, "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa," *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 6 No. 1 (2018): 2, <https://doi.org/10.17509/jrak.v6i1.10303>.

bagian universal yang kemudian dituntunkan menjadi pertanggungjawaban (akuntabilitas). Pemberian amanah dalam hal ini adalah Allah SWT yang telah menciptakan manusia sebagai wakilnya di bumi (*khalifatullah fill ardh*) seperti dalam Al Qur'an Surah Fathir ayat 39 :

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ  
الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ إِلَّا  
خَسَارًا [سورة فاطر, ٣٩]

*“Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi. Barangsiapa kafir, maka (akibat) kekafirannya akan menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kemurkaan di sisi Tuhan mereka. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kerugian mereka belaka”. (Q.S.Fathir [35]: 39)*

Dari ayat diatas dapat dijelaskan bahwa ”Dialah yang menjadikanmu khalifah-khalifah dibumi”, mempunyai makna si penerima amanah (khalifah) harus melakukan tugasnya di bumi secara bertanggung jawab, dan dalam menjalankan amanah tersebut harus bersifat adil dan menjadikannya sebagai rahmat (bermanfaat bagi orang lain).<sup>10</sup>

Untuk mencapai akuntabilitas dalam penyelenggaraan suatu program maka diperlukan sebuah sistem yang bisa mendukung jalan dari program tersebut. Sistem informasi akuntansi merupakan seperangkat prosedur yang mempunyai tujuan menghasilkan informasi yang tepat dan berguna bagi semua pihak, informasi diperoleh dari pengumpulan dan pemrosesan data yang dapat digunakan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya. Sistem ini meliputi orang, prosedur dan instruksi, data, perangkat lunak,

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Depok: Cahaya Qur'an, 2008), 440.

infrastruktur teknologi informasi, serta pengendalian internal dan ukuran keamanan.<sup>11</sup>

Sistem informasi akuntansi yang baik diharapkan dapat menjamin proses penyaluran dana terlaksana dengan baik dan terhindar dari kesalahan atau penyelewengan. Fungsi dari sistem informasi akuntansi terhadap sebuah organisasi adalah untuk mengumpulkan dan menyimpan berbagai macam data mengenai aktivitas dan transaksi dari perusahaan dan kemudian data tersebut diproses menjadi sebuah informasi yang dapat digunakan oleh manajemen dalam mengambil suatu keputusan yang diperlukan.<sup>12</sup>

Program keluarga harapan (PKH) merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Program keluarga harapan (PKH) suatu keharusan yang dijalankan sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) dengan tujuan mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan agar lebih terencana dan terarah.<sup>13</sup>

Bantuan tunai bersyarat yakni sebuah program keluarga harapan (PKH) memiliki ketentuan dalam memberikan bantuan sosial kepada keluarga penerima manfaat diantaranya merupakan keluarga sangat miskin (KSM) dan tercatat di dalam basis data terpadu hasil pendapatan program perlindungan sosial (PPLS) yang dikelola oleh tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan (TNP2K). Para penerima bantuan sedikitnya harus memenuhi kriteria kepesertaan program yaitu memiliki ibu hamil

---

<sup>11</sup> Marsall B. Romney, Paul John Steinbart, *Sistem Informasi Akuntansi* (Jakarta: Grasindo, 2020), 10.

<sup>12</sup> Rufaida Azizah, "Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Akuntabilitas (Studi Pada Pelaksanaan Keluarga Harapan (PPKH) di Kecamatan Pagelaran)" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), 1.

<sup>13</sup> Verni Stefiana, Dkk, "Tata Kelola Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan Di Desa Malimbong Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat," *Journal Of Public Service, Public Police, And Administration*, Vol. 1 No. 1 (2021): 65, <http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1319>.

/nifas/anak balita, memiliki anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan dasar (anak pra-sekolah), anak usia 7 sampai 12 tahun, anak usia 12 sampai 15 tahun, anak usia 15 sampai 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar termasuk anak disabilitas, dan para lanjut usia dimulai dari 60 tahun.<sup>14</sup>

Dalam pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) para penerima bantuan yaitu keluarga penerima manfaat (KPM) akan didampingi oleh para petugas pendamping. Peran petugas pendamping disini merupakan jembatan bagi para KPM atas ketidak pahaman mengenai program bantuan. Program PKH merupakan bantuan tunai yang diterima para KPM tetapi sistem informasi berkembang selama masa hidup suatu program. Secara teknis program pengentasan kemiskinan mengubah sistem bantuan tunai menjadi non tunai yang mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Keluarga penerima manfaat (KPM) akan menerima dana bantuan melalui rekening, dimana para KPM dituntut agar memiliki buku tabungan yang diperoleh dari bank. Perubahan sistem penyaluran dana program bantuan tunai menjadi non tunai ini dilakukan dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program penyaluran dana sehingga mudah dikontrol, dipantau dan meminimalisir penyimpangan.<sup>15</sup>

Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu instansi penyaluran dana program keluarga harapan yang akan disebar luaskan ke seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Sejak 2007 pemerintah telah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH), program perlindungan sosial atau dikenal didunia internasional dengan Conditional Cash Transfer. Dan pemerintahan Kabupaten

---

<sup>14</sup> Zuhendra dan Atika Sari Devi, "Sistem Akuntansi Pencairan dan Penyaluran Dana Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Dinas Sosial Kota Padang," *Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang (JAAIP)*, Vol. 1 No. 2 (2021): 98, <https://doi.org/10.31933/jaaip.v1i2.407>.

<sup>15</sup> Selli Marsela, "Sistem Akuntansi Pencairan dan Penyaluran Dana Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) pada Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi", (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), 3.

Lampung Barat mulai melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2013 yang tersebar di 15 Kecamatan, 131 Pekon dan 5 Kelurahan. Hingga saat ini jumlah penerima bantuan PKH di Kabupaten Lampung Barat telah mencapai 16.831 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dengan jumlah pendamping sebanyak 66 orang.

**Tabel 1.1**  
**Data Perkembangan Peserta PKH di Dinas Sosial**  
**Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018-2022**

No	Tahun	Jumlah Peserta	Nominal
1.	2018	6.698	3.349.000.000
2.	2019	14.528	18.356.700.000
3.	2020	15.872	12.026.350.000
4.	2021	16.607	11.845.275.000
5.	2022	16.831	12.260.725.000

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah peserta atau keluarga penerima manfaat PKH di Kabupaten Lampung Barat setiap tahun mengalami peningkatan. Sedangkan jumlah nominal penyaluran PKH setiap tahun mengalami perubahan dikarenakan dilakukan pemutakhiran data penerima Bantuan Program Keluarga Harapan dua kali dalam satu tahun, hal ini dilakukan untuk memperbaharui informasi data peserta yang tentu saja berpengaruh terhadap kriteria peserta PKH serta terdapat faktor lain yaitu perubahan anggaran yang dianggarkan Pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya dikarenakan dilakukan pemutakhiran data penerima PKH serta anggaran dana yang dianggarkan pemerintah meningkat sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Pada tahun 2020 nominal dana PKH mengalami penurunan dikarenakan Indonesia

terdampak wabah Covid 19 yang juga mempengaruhi perekonomian Indonesia sehingga terjadi penurunan anggaran bantuan PKH, penurunan ini terjadi hingga tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2022 perekonomian Indonesia sudah mulai membaik dan mengalami pertumbuhan sehingga anggaran dana PKH dapat kembali meningkat. Dalam melaksanakan program bantuan tersebut, instansi pemerintah harus menginformasikan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan yang direncanakan dalam rangka mencapai pemerintahan yang baik. Pencapaian tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh koordinator pelaksanaan kegiatan. Untuk menghindari masalah dan mencegah kecurangan, mekanisme akuntabilitas pengelolaan uang dalam proyek penanggulangan kemiskinan perlu dikelola dan dipantau dengan baik.

Dengan adanya Perubahan sistem penyaluran dana menjadi non tunai ini ternyata masih terjadi problematik terkait dengan penyaluran dana. Karena setiap sistem memiliki siklus pengembangan sistem yang terdiri dari beberapa tahap yaitu perencanaan sistem hingga pengoperasian sistem. Implementasi dari perubahan sistem ini ternyata masih terdapat masalah yang terjadi dalam program ini yaitu adanya penyimpangan dana yang dilakukan para pendamping dan ketua kelompok karena kurangnya pemahaman masyarakat sebagai penerima dalam cara penggunaan bantuan berbasis non tunai penyaluran dana PKH ini sehingga dimanfaatkan sejumlah petugas pendamping maupun ketua kelompok melakukan pemotongan dana setiap kali pencairan dana berlangsung. Selain itu, masih adanya ketidaktepatan sasaran penerima dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan, dimana banyak masyarakat yang secara ekonomi diatas rata-rata menerima PKH, sedangkan masyarakat yang benar-benar miskin justru tidak tersentuh sama sekali. Juga terdapat keterlambatan pada kegiatan penyaluran bantuan sosial PKH sehingga tidak sesuai dengan jadwal penyaluran yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 tentang Program

Keluarga Harapan dan Buku Pedoman Penyaluran Bantuan Sosial PKH Tahun 2021.<sup>16</sup>

Pengelolaan dana Program Keluarga Harapan yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat mengalami tingkat pengontrolan dan transparansi yang rendah. Pada tahun 2018 terdapat pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat penerima PKH Pekon Bakhu Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat, yaitu para KPM mengeluhkan penarikan dana sebesar 25.000 untuk setiap pencairan bantuan dana PKH oleh ketua kelompok dengan dalih uang pulsa dan pembinaan.<sup>17</sup> Selain itu, pada tahun 2020 terdapat dugaan sebanyak 494 aparatur pemerintahan yang ada di kabupaten Lampung Barat diduga kuat sebagai penikmat program keluarga harapan (PKH). Sedangkan aparat Pekon merupakan masyarakat yang tidak layak menerima PKH karena aparat Pekon pemegang SK dan digaji oleh Negara sehingga jelas aparat pekon bukan fakir miskin sebagai landasan dasar masyarakat yang berhak menerima PKH berdasarkan peraturan tentang penanganan fakir miskin.<sup>18</sup>

Peranan sistem informasi akuntansi terhadap kemajuan lembaga PPKH sangat dibutuhkan. Dengan dukungan sistem informasi akuntansi yang baik maka sebuah program keluarga harapan (PKH) akan berjalan dengan baik. Teknik dalam sistem informasi akuntansi biasanya menggunakan *Flowchart* (bagan alur). Bagan alur (*flowchart*) inilah yang menunjukkan arus data dan

---

<sup>16</sup> Zuhendra dan Atika Sari Devi, "Sistem Akuntansi Pencairan dan Penyaluran Dana Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Dinas Sosial Kota Padang," *Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang (JAAIP)*, Vol. 1 No. 2 (2021): 93, <https://doi.org/10.31933/jaaip.v1i2.407>.

<sup>17</sup> Aripsah, "Penerima PKH di Batuketulis (Lampung Barat) Keluhkan Tarikan Uang Pulsa," *Lampost.co*, 2018, <https://www.lampost.co/berita-penerima-pkh-di-batuketulis-lambar-keluhkan-tarikan-uang-pulsa.html>.

<sup>18</sup> Aditya Zulkarnain, "Kacau, Di Duga Ratusan Perangkat Pekon Di Lampung Barat Nikmati Dana PKH," *Beeoneinfo.Com*, 2020, <http://beeoneinfo.com/kacau-di-duga-ratusan-perangkat-pekon-di-lampung-barat-nikmati-dana-pkh/>.

tahapan operasi dari satu bagian ke bagian lain yang terdiri dari beberapa prosedur dalam sebuah sistem.<sup>19</sup>

Sistem Informasi Akuntansi yang terdapat di Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat dalam melaksanakan pengolahan dan pembaharuan data peserta PKH di Dinas Sosial saat ini bisa diakses secara *online* yaitu menggunakan aplikasi SIKS-NG (Sistem Kesejahteraan Sosial-Next Generation) yang dapat digunakan dalam melakukan pendataan warga miskin. Dalam aplikasi ini sudah ada blanko data BDT dan KKS masing-masing desa yang nanti akan diverifikasi dan divalidasi. Verifikasi dan validasi BDT bertujuan untuk mengetahui rumah tangga yang layak mendapatkan program bantuan, sedangkan verifikasi KKS bertujuan memperbaiki kepesertaan program bantuan sosial pangan. Meskipun begitu, kendala umum yang terjadi dalam penerapan Sistem Informasi Akuntansi di Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat sering terkendala jaringan error, banyak pedesaan di Lampung Barat masih belum bisa mengakses internet dikarenakan letak pedesaan yang terpencil. Hal ini tentu akan menghambat jalannya proses data yang di input.

Alasan peneliti memilih penelitian di Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat adalah Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat merupakan instansi penyaluran dana program keluarga harapan yang disebar luaskan ke seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Akan tetapi masalah yang terjadi pada objek penelitian ini yaitu belum pernah dilakukan penelitian tentang Sistem Informasi Akuntansi yang digunakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat sedangkan hal ini dianggap perlu untuk mengetahui bagaimana prosedur seleksi penerima dana PKH, prosedur pencairan dana PKH dan prosedur penyaluran dana PKH yang ada di Dinas Sosial sehingga bisa tercapai dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Penyaluran dana dapat dikatakan baik jika sistem itu akuntabel artinya sistem yang dapat dipertanggung jawabkan karena sistem

---

<sup>19</sup> Dwi Sulistiani, "Peningkatan Akuntabilitas Publik Melalui Sistem Informasi Akuntansi pada Pondok Pesantren Salafiyah," *Jurnal Ilmu Akuntansi*, Vol. 12 No. 2 (2019): 239, <https://doi.org/10.15408/akt.v12i2.9662>.

informasi akuntansi merupakan suatu keharusan dalam mengumpulkan, memasukkan, memproses, menyimpan, dan melaporkan data informasi yang bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana pada program keluarga harapan (PKH).

Penelitian terdahulu menurut Dwi Sulistiani, yang mengkaji tentang penyusunan *flow Chart* Sistem informasi Akuntansi kas keluar untuk Pondok Pesantren Sabilurrosyad sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas publik. Hasil penelitian terdahulu ini menyatakan dengan adanya sistem informasi akuntansi dapat meningkatkan akuntabilitas publik yaitu dengan penyusunan *flow chart* Sistem Informasi Akuntansi.<sup>20</sup> Penelitian lainnya menurut Mas'ud dan Abdan Masrura, yang mengkaji tentang pengaruh penerapan Sistem informasi akuntansi demi menunjang tujuan Program Pemerintah agar tercapai serta meningkatkan Akuntabilitas pendapatan Daerah. Hasil penelitian terdahulu ini menyatakan bahwa penerapan Sistem Informasi Akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pendapatan pajak daerah. Penerapan Sistem Informasi Akuntansi pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan telah berjalan dengan sangat baik, sehingga akuntabilitas pendapatan pajak daerah juga dapat berjalan dengan sangat baik dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>21</sup>

Dari penelitian terdahulu, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah pada objek penelitian dimana penelitian ini menggunakan objek penelitian pengelolaan dana Program Keluarga Harapan serta lokasi penelitian yang berbeda. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai sistem informasi akuntansi pengelolaan dana PKH di Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat. Jika Sistem Informasi penyaluran dana dilakukan secara efektif dan efisien maka dapat

---

<sup>20</sup> Dwi Sulistiani, "Peningkatan Akuntabilitas Publik Melalui Sistem Informasi Akuntansi pada Pondok Pesantren Salafiyah", *Jurnal Ilmu Akuntansi*, Vol. 12 No. 2 (2019): 246, <https://doi.org/10.15408/akt.v12i2.9662>.

<sup>21</sup> Mas'ut dan Abdan Masrura, "Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas pendapatan Pajak Daerah di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Medan," *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM)*, Vol. 5 No. 1 (2018): 29-37, <https://doi.org/10.30743/akuntansi.v5i1>.

mewujudkan sistem penyaluran dana yang tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas program penyaluran bantuan sosial dalam pengelolaan dana demi mencapai tujuan program pemerintah dalam pengetasan kemiskinan yang pada akhirnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut penelitian ini, maka penulis merekomendasikan proposal skripsi dengan judul **“Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Dana Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Akuntabilitas Ditinjau Dari Perspektif Akuntansi Syariah (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat)”**.

### **C. Identifikasi Masalah**

1. Perubahan sistem ke non tunai memicu problematik pemotongan dana oleh beberapa pendamping dan ketua kelompok pada saat pencairan berlangsung.
2. Masih adanya ketidak tepatan sasaran penerima dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan.
3. Terdapat keterlambatan pada kegiatan penyaluran bantuan sosial PKH sehingga tidak sesuai dengan jadwal penyaluran yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan dan Buku Pedoman Penyaluran Bantuan Sosial PKH Tahun 2021.

### **D. Fokus dan Sub Fokus Penelitian**

#### **1. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan diatas, maka fokus penelitian adalah tempat spesifik untuk diteliti. Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat sehingga penelitian ini berfokus pada pengelolaan dana keluarga harapan (PKH) di Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat.

## 2. Sub Fokus Penelitian

Sub fokus yang dimaksudkan adalah penerapan sistem informasi akuntansi pengelolaan dana Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya meningkatkan akuntabilitas pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat. Dan pandangan Akuntansi Syariah mengenai akuntabilitas pengelolaan dana program keluarga harapan.

### E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi pengelolaan dana Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya meningkatkan akuntabilitas pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat?
2. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana program keluarga harapan dalam perspektif Akuntansi Syariah pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat?

### F. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis sistem informasi akuntansi pengelolaan dana Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya meningkatkan akuntabilitas pada Dinas Sosial Lampung Barat.
2. Untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan dana program keluarga harapan dalam perspektif Akuntansi Syariah pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat.

### G. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat yang dapat dirasakan atau di terapkan baik secara langsung ataupun tidak langsung kepada pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritik

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kalangan akademisi seperti dosen, mahasiswa, peneliti dimana hasil penelitian ini dapat

dijadikan sebagai bahan referensi dan masukan bagi penelitian selanjutnya tentang sistem informasi akuntansi pengelolaan dana program keluarga harapan dalam upaya meningkatkan akuntabilitas.

## 2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat secara praktis dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

### a. Bagi Dinas Sosial

Diharapkan dapat memberikan masukan positif bagi kemajuan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat dalam melaksanakan tugasnya dalam penyaluran dana bantuan Program Keluarga Harapan serta dapat meningkatkan peran serta kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan PKH.

### b. Bagi Pihak Lain

Dapat dijadikan sebagai bahan informasi yang bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi para pembaca.

## H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian terdahulu adalah kajian yang digunakan dalam penelitian sebelumnya sesuai dengan variabel judul yang penulis lakukan. Berikut ringkasan beberapa penelitian terdahulu:

1. Penelitian menurut Zuhendra dan Atika Sari Devi dengan judul Sistem Akuntansi Pencairan dan Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan PKH pada Dinas Sosial Kota Padang Tahun 2020. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah pada setiap tahap penyaluran dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang tidak tersalurkan maka pendamping akan berkoordinasi langsung dengan kepala keluarga dan korbab PKH untuk mendata permasalahan. Selanjutnya pendamping akan menindak lanjuti permasalahan itu agar dana bantuan dapat disalurkan semuanya. Sistem prosedur perhitungan dana bantuan Program Keluarga Harapan pada Dinas Sosial kota padangi

telah sesuai dengan yang diterapkan oleh kementerian sosial RI.<sup>22</sup>

2. Penelitian menurut Dwi Sulistiani dengan judul Peningkatan Akuntabilitas melalui Sistem Informasi Akuntansi pada Pondok Pesantren Salafiyah. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah Berdasarkan analisis transaksi dengan model COSO menemukan bahwa lingkungan pengendalian masih belum begitu bagus. Hal tersebut terbukti dengan adanya perangkapan tugas antara bagian kasir dan bagian *accounting*. Kemudian perangkapan tugas bagian gudang dan bagian pembelian yang dilakukan oleh bagian pengadaan barang. Kegiatan pengendalian perlu ditingkatkan dengan adanya persetujuan dari pihak kepala sekolah untuk pengeluaran yang sifatnya tidak rutin. Mengenai pemahaman resiko juga masih belum dipahami oleh pihak pengelola pondok pesantren. Pihak pengelola pondok pesantren Sabilurrosyad belum paham terkait resiko keuangan yang dihadapi baik itu kecurangan maupun kehilangan. Sistem di pondok pesantren masih mengandalkan kepercayaan yang tinggi kepada karyawannya yang itu memang menjadi ciri khas akuntansi di pondok pesantren. Monitoring dilakukan dengan adanya laporan keuangan bulanan yang diberikan bendahara pada kepala sekolah dan laporan keuangan tahunan yang diserahkan kepada pengurus pondok pesantren. Perancangan SIA kas keluar berupa catatan, formulir dan flowchart telah memperhatikan sistem pengendalian internal yang dibutuhkan oleh pondok pesantren Sabilurrosyad. Perancangan flowchart terdiri dari: flowchart prosedur aktivitas pembiayaan dan aktivitas pembiayaan gaji.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Zuhendra, dan Atika Sari Devi, "Sistem Akuntansi Pencairan dan Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan pada Dinas Sosial Kota Padang Tahun 2020," *Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang (JAAIP)*, Vol. 1 No. 2 (Oktober 2021): 92-100, <https://doi.org/10.31933/jaaip.v1i2.407>.

<sup>23</sup> Dwi Sulistiani, "Peningkatan Akuntabilitas Publik Melalui Sistem Informasi Akuntansi Pada Pondok Pesantren Salafiyah," *Peningkatan Akuntabilitas Publik*

3. Penelitian menurut Mas'ud dan Abdan Masrura dengan judul Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pendapatan Pajak Daerah Di Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Kota Medan. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Hasil pengujian menunjukkan bahwa penerapan Sistem Informasi Akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pendapatan pajak daerah. Penerapan Sistem Informasi Akuntansi pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan telah berjalan dengan sangat baik, sehingga akuntabilitas pendapatan pajak daerah juga dapat berjalan dengan sangat baik dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>24</sup>
4. Penelitian menurut Anna Zahrotul Wahidah, Anna Widayani, Shanti Ike Wardhani, Ika Rachmawati, dan Nunuk Latifah dengan judul Prosedur Penyaluran Bantuan Sosial Di Era Pandemi Covid-19 Pada Dinas Sosial Kabupaten Blitar. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Prosedur penyaluran bantuan sosial merupakan serangkaian kegiatan pembagian berupa uang atau barang jadi oleh pemerintah kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif dengan tujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Pada masa pandemi ini, bantuan sosial yang ditangani Dinas Sosial Kabupaten Blitar yaitu bantuan sosial PKH, Bantuan Sosial Tunai (BST), dan bantuan program sembako. Secara umum setiap bantuan sosial memiliki tahapan penyaluran yang sama yaitu pada proses pendataan KPM, pengiriman data ke Dinas Sosial, verifikasi dan pemutakhiran data, penginputan data ke dalam

---

*Melalui Sistem Informasi Akuntansi Pada Pondok Pesantren Salafiyah*, Vol. 12 No. 2 (2019): 237-248, <https://doi.org/10.15408/akt.v12i2.9662>.

<sup>24</sup> Mas'ut dan Abdan Masrura, "Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas pendapatan Pajak Daerah di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Medan," *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM)*, Vol. 5 No. 1 (2018): 29-37, <https://doi.org/10.30743/akuntansi.v5i1>.

DTKS, pengecekan data, dan penetapan SK KPM. Perbedaannya hanya pada cara pengambilan bantuan sosial serta bentuk bantuan yang didapatkan.<sup>25</sup>

5. Penelitian menurut Syerlie Annisa, Juwita Azizah, Leonard Tambunan dengan judul Perancangan dan Impelementasi Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Web untuk Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dan pengembangan (*research and development*). Berdasarkan hasil pengujian dan pengaplikasian sistem informasi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Sistem informasi yang telah dibangun dapat membantu para pengguna mengelola laporan keuangan sekolah seperti pendapatan dan pengeluaran yang sistematis dan terintegrasi oleh semua pengguna yang bersangkutan dan mempunyai hak akses ke dalam sistem. Sistem informasi yang telah dibangun memudahkan pihak sekolah dalam mencetak kuitansi langsung sehingga memudahkan Bendahara dalam mengelola sekaligus mencetak kuitansi pendapatan maupun pengeluaran, serta bagi kepala sekolah dapat dengan mudah mengakses dan mencetak laporan keuangan secara digital tanpa harus takut kehilangan berkas catatan pembayaran serta seluruh data pendapatan dan pengeluaran sekolah, Sistem informasi keuangan dapat membuat pengelolaan keuangan sekolah lebih efektif dan efisien dalam hal pembukuan uang sekolah secara digital serta dapat meningkatkan transparansi dan laporan keuangan yang akuntabel.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Anna Zahrotul Wahidah, Dkk, "Prosedur Penyaluran Bantuan Sosial Di Era Pandemi Covid-19 Pada Dinas Sosial Kabupaten Blitar," *Competence: Journal of Management Studies*, Vol. 16 No. 1 (April 2022): 51-63, <https://doi.org/10.21107/kompetensi.v16i1.14429>.

<sup>26</sup> Syerlie Annisa, Juwita Azizah, and Leonard Tambunan, "Perancangan dan Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Web Dalam Upaya Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas," *SATIN-Sains dan Teknologi Informasi* Vol. 7 No. 2 (2021): 44-52, <https://doi.org/10.33372/stn.v7i2.756>.

6. Penelitian menurut Siska Wahyuni, Novita Indrawati, Al Azhar L dengan judul Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Sistem Informasi Akuntansi, Dan Kompetensi Aparat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Studi Empiris Desa-Desa Di Kabupaten Rokan Hulu. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian intern, sistem informasi akuntansi dan kompetensi aparat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.<sup>27</sup>
7. Penelitian menurut Yuni Aliyatul Rohmah dengan judul Analisis Akuntabilitas Program Keluarga Harapan (Studi Deskriptif Akuntabilitas Administratif Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan di Kecamatan Semampir Surabaya). Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Berdasarkan hasil analisis data dan observasi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Semampir telah memenuhi akuntabilitas administratif, tetapi pada indikator kriteria dan mekanisme dalam akuntabilitas administratif masih belum memenuhi akuntabilitas administratif. Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan, terdapat faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan Program Keluarga Harapan yaitu kejelasan prosedur sehingga dapat membantu petugas PKH untuk melaksanakan tugasnya serta terdapat pihak eksternal yang ikut mengawasi jalannya pelaksanaan Program Keluarga Harapan yaitu BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan lembaga peradilan.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Siska Wahyuni, Novita Indrawati, and A. Al Azhar. "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Sistem Informasi Akuntansi, Dan Kompetensi Aparat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Studi Empiris Desa-Desa Di Kabupaten Rokan Hulu," *Jurnal Ekonomi* Vol. 26 No. 3 (2018): 98-110, <http://dx.doi.org/10.31258/je.26.3.p.98-110>.

<sup>28</sup> Yuni Aliyatul Rohmah, "Analisis Akuntabilitas Program Keluarga Harapan (Studi Deskriptif Akuntabilitas Administratif Pelaksanaan Program Keluarga Harapan

8. Penelitian menurut Novendi Arkham Mubtadi, Gita Paramita Agustin dan Dewi Susilowati dengan judul Akuntabilitas dalam Perspektif Akuntansi Syariah (Studi Kasus pada Baznas Kabupaten Kebumen). Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah akuntabilitas pelaporan dana ZIS berkaitan dengan *penthasaruffan* yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kebumen sudah sesuai dengan perspektif Akuntansi Syariah.<sup>29</sup>
9. Penelitian menurut Juriah, Nur Fadhilah, Ahmad Hasibuan dengan judul Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi kasus Dibidang Fakir Miskin Pada Kantor Dinas Sosial Mandailing Natal). Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Mandailing Natal belum berjalan dengan efektif. Oleh karena itu diperlukan evaluasi dan perbaikan untuk beberapa indikator yaitu indikator sasaran penerima, waktu dan penggunaan teknologi.<sup>30</sup>
10. Penelitian menurut Arum Maulida dengan judul Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Di Kantor Kelurahan Desa Kembangan, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak Tahun 2020. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah,

---

Bidang Pendidikan Di Kecamatan Semampir Surabaya)," *Jurnal Aplikasi Administrasi*, Vol. 18 (Mei 2015): 1-9, <https://doi.org/10.30649/aamama.v18i1.27>.

<sup>29</sup> Novendi Arkham Mubtadi, Gita Paramita Agustin, Dewi Susilowati, "Akuntabilitas dalam Perspektif Akuntansi Syariah (Studi Kasus pada Baznas Kabupaten Kebumen)," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 7 No. 2 (Desember 2017): 79-89, [http://dx.doi.org/10.21927/jesi.2017.7\(2\).79-89](http://dx.doi.org/10.21927/jesi.2017.7(2).79-89).

<sup>30</sup> Juriah, Nur Fadhilah, Ahmad Hasibuan, "Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi kasus Dibidang Fakir Miskin Pada Kantor Dinas Sosial Mandailing Natal)," *JURNAL EMBA REVIEW*, Vol. 2 No. 2 (2022): 413-420, <https://penerbitadm.com/index.php/JER/>.

pemerintahan Desa Kembangan berpedoman pada Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2020. Secara keseluruhan sistem informasi akuntansi pembagian BLT-DD di Desa Kembangan sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2020 namun ada beberapa kesalahan pada tahap pelaksanaan pembagian dana BLT-DD yaitu terdapat ketidaksesuaian dengan rencana yang ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2020 yang terjadi di lapangan, tidak adanya publikasi pada masyarakat dan ada perbedaan pada jumlah anggaran BLT dana Desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2020 dengan pelaksanaan di lapangan.<sup>31</sup>

Dari penelitian terdahulu, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah pada objek penelitian dimana penelitian ini menggunakan objek penelitian pengelolaan dana Program Keluarga Harapan serta lokasi penelitian yang berbeda. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai sistem informasi akuntansi pengelolaan dana PKH di Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat. Jika Sistem Informasi penyaluran dana dilakukan secara efektif dan efisien maka dapat mewujudkan sistem penyaluran dana yang tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas program penyaluran bantuan sosial dalam pengelolaan dana demi mencapai tujuan program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan yang pada akhirnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **I. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan karena peneliti langsung kelapangan. Adapun sifat penelitian ini

---

<sup>31</sup> Arum Maulida, "Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Di Kantor Kelurahan Desa Kembangan, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak Tahun 2020" (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021), 45.

bersifat penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Penelitian dengan metode deskriptif kualitatif ini menggunakan data dan referensi baik berupa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan daerah tersebut.<sup>32</sup> Karena itu penulis ingin mendiskripsikan tentang Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Dana Program Keluarga Harapan dalam Upaya Meningkatkan Akuntabilitas Ditinjau dari Perspektif Akuntansi Syariah Pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat.

## 2. Informan Penelitian

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Oleh karena itu, pada penelitian kualitatif tidak dikenal dengan adanya populasi dan sampel.<sup>33</sup> Subjek penelitian ini menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan dalam proses penelitian. Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh forman yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan, atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut.<sup>34</sup>

Teknik pengambilan informan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah secara *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan subjek mencakup orang-orang yang diseleksi atas dasar kriteria-kriteria tertentu yang dibuat peneliti atas tujuan tertentu. Adapun kriteria informan dalam penelitian ini adalah narasumber yang kredibel dan berkompeten serta memahami tentang Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Dalam Upaya Meningkatkan Akuntabilitas pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat. Sehingga, untuk

---

<sup>32</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2010), 28.

<sup>33</sup> Suyanto, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Kencana Prenanda Media Grup, 2011), 171.

<sup>34</sup> *Ibid*, 160.

mengumpulkan data yang berkaitan tentang penelitian ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan informan kunci yaitu koordinator PKH atau Kepala Bidang perlindungan dan jaminan sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat, serta informan tambahan dalam penelitian ini adalah operator aplikasi SIKS-NG, pendamping PKH, dan masyarakat penerima PKH.

### 3. Sumber Data

Menurut Suharmisi Adikunto, data adalah hasil pencatatan peneliti baik berupa fakta maupun angka. Berdasarkan SK Menteri P&K No. 0259/U/1977, data didefinisikan sebagai segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi.<sup>35</sup> Data digunakan dalam memperkuat pendapat dari suatu permasalahan dan digunakan untuk memberikan jawaban dari permasalahan dalam penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut :

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian tentang permasalahan yang dibahas.<sup>36</sup> Data primer dapat diperoleh dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan, selanjutnya mengadakan wawancara langsung dengan pihak yang berkompeten dan memahami mengenai Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Dalam Upaya Meningkatkan Akuntabilitas pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat.
- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada, yaitu dari buku-buku dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan

---

<sup>35</sup> Margono S, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 70.

<sup>36</sup> Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 79.

penelitian yang dilakukan.<sup>37</sup> Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dengan pengumpulan dokumen yang terdapat di kantor Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu, prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.<sup>38</sup>

##### a. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk Tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal.<sup>39</sup> Penulis dalam penelitian ini melakukan wawancara langsung dengan koordinator PKH atau kepala bidang perlindungan atau jaminan sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat, operator SIKS-NG, pendamping PKH, dan masyarakat penerima bantuan PKH.

##### b. Dokumentasi

Dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.<sup>40</sup> Teknik pengumpulan data ini digunakan dalam mengetahui sistem informasi akuntansi pengelolaan dana program keluarga harapan dalam upaya meningkatkan akuntabilitas pada Dinas Sosial Kabupaten

---

<sup>37</sup> Anata Wikrama Tungga, Dkk, *Metode Penelitian Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 68.

<sup>38</sup> Sugiono, *Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2010), 45.

<sup>39</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sirasi, 2010), 38.

<sup>40</sup> Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif," *Wacana*, Vol. 13 No. 2 (2014): 45, <https://doi.org/10.32509/wacana.v13i2.143>.

Lampung Barat. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku profil Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat, gambar Laporan rekapitulasi pencairan bansos PKH, dan gambar bukti wawancara.

## 5. Instrumen Penelitian

Instrument penelitian adalah alat-alat yang diperlukan atau dipergunakan untuk mengumpulkan data, ini berarti dengan menggunakan alat-alat tersebut data dikumpulkan. Ada perbedaan alat-alat penelitian dalam metode kualitatif dengan yang dalam metode penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif, instrumen utama dalam pengumpulan data adalah manusia yaitu, peneliti sendiri atau orang lain yang membantu peneliti. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri yang mengumpulkan data dengan cara bertanya, meminta, mendengar, dan mengambil. Peneliti dapat meminta bantuan dari orang lain untuk mengumpulkan data, disebut pewawancara. Dalam hal ini, seorang pewawancara yang langsung mengumpulkan data dengan cara bertanya, meminta, mendengar, dan mengambil. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, alat pengumpulan data mengacu pada satu hal yang dipergunakan peneliti untuk mengumpulkan data, yang biasanya disebut kuisioner. Perbedaan pokok dari penelitian kualitatif dan kuantitatif adalah dalam penelitian kualitatif peneliti sendiri yang harus mengumpulkan data dari sumber, sedangkan dalam penelitian kuantitatif orang yang diteliti (responden) dapat mengisi sendiri kuisioner tanpa kehadiran peneliti, seperti survei elektronik atau kuisioner yang dikirimkan.<sup>41</sup>

Adapun instrumen-instrumen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. *Key instrument*; peneliti sendirilah yang berperan sebagai alat utama dalam penelitian.

---

<sup>41</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 25.

- b. Instrumen lainnya, yaitu pedoman wawancara, alat perekam wawancara, dan alat pengambilan gambar (kamera foto dan video).

## 6. Metode Analisis Data

Berdasarkan penyusunan diatas, maka dalam melaksanakan penganalisaan penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif. analisis data kualitatif yaitu proses mencari serta menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan lainnya sehingga mudah dipahami agar dapat di informasikan kepada orang lain.<sup>42</sup> setelah data terkumpul penulis mengelolanya dengan mengadakan seleksi terhadap data, kemudian akan di klasifikasikan sesuai aspek masalah yang telah disusun, kemudian akan di analisis dengan menggunakan analisis data kualitatif yang berhubungan dengan analisis sistem informasi akuntansi pengelolaan dana program keluarga harapan dalam upaya meningkatkan akuntabilitas pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat.

Untuk memberikan gambaran hasil penelitian maka dilakukan prosedur analisis sebagai berikut:

- a. Pengumpulan Data

Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap informan yang berkompeten terhadap penelitian kemudian langsung ke lapangan untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar mendapatkan sumber data yang diharapkan.

- b. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan

---

<sup>42</sup> Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Praktek* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 9.

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

c. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data reduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya.

d. *Conclusion Drawing / Verification*

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.<sup>43</sup>

Pengolahan analisis data ini akan digunakan metode analisis yaitu metode berpikir induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Metode ini digunakan untuk menganalisa data kemudian mengambil sebuah kesimpulan yang bersifat umum. Metode yang akan penulis gunakan untuk menyaring data yang telah terkumpul, dan dengan metode ini juga, data dianalisis sehingga didapatkan jawaban benar dari pembahasan skripsi ini.

## J. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini maka penulis mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing masing bab tersebut menjadi beberapa sub bab. Semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh, yang saling berkaitan dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah:

---

<sup>43</sup> Sugiyono, *Metode Kualitatif* (Bandung: CV Alfabeta. 2015), 91.

BAB I PENDAHULUAN, bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar pembahasan dalam skripsi ini, yang meliputi beberapa aspek yang berkaitan dengan persoalan skripsi, yang diuraikan menjadi beberapa sub- bab yaitu penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI, bab ini memuat uraian mengenai teori yang digunakan, sub bab kedua yaitu mengenai Akuntabilitas yang terdiri atas pengertian akuntabilitas, Akuntabilitas dalam perspektif Islam dan keterkaitan akuntabilitas dan program keluarga harapan. Sub bab selanjutnya yaitu mengenai Sistem Informasi Akuntansi yang terdiri atas Pengertian Sistem Informasi Akuntansi, Tujuan Sistem Informasi Akuntansi, Fungsi Sistem Informasi Akuntansi, Manfaat Sistem Informasi Akuntansi, Elemen-elemen Sistem Informasi Akuntansi, Komponen Sistem Informasi Akuntansi, Keterkaitan Sistem Informasi Akuntansi dan Program Keluarga harapan (PKH). Dan sub bab terakhir yaitu mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) yang terdiri atas Pengertian Program Keluarga Harapan, Tujuan Program Keluarga Harapan, Manfaat Program Keluarga Harapan, Sasaran Program Keluarga Harapan, Kriteria Penerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan, Alur Kerja Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan, Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan.

BAB III GAMBARAN OBJEK PENELITIAN, bab ketiga merupakan gambaran umum Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat meliputi Sejarah, Visi dan Misi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat. Sub bab selanjutnya mengenai Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Dana PKH pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat, dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana PKH pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat.

BAB IV ANALISIS PENELITIAN, bab keempat merupakan inti dari penelitian yaitu Penerapan Sistem Informasi

Akuntansi Pengelolaan Dana Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Akuntabilitas pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat, dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Program Keluarga Harapan Dalam Perspektif Akuntansi Syariah pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat.

BAB V PENUTUP, bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi analisis yang berisikan kesimpulan dan rekomendasi.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. *Stewardship Theory*

Teori *Stewardship* adalah teori yang dicetuskan oleh Donaldson dan Davis. Teori *stewardship* berasumsi bahwa manusia pada hakikatnya mampu bertindak dengan penuh tanggungjawab, dapat dipercaya, berintegritas tinggi dan memiliki kejujuran. Teori ini memandang *steward* (pemerintah) sebagai pihak yang mampu melaksanakan tindakan yang sebaik-baiknya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan *principal* (masyarakat). Konsep teori ini berdasarkan asas kepercayaan pada pihak yang diberikan wewenang, dimana manajemen dalam suatu organisasi dicerminkan sebagai *good steward* yang melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasannya dengan penuh tanggungjawab.<sup>44</sup>

*Steward* tidak memiliki keinginan untuk memenuhi kepentingan pribadi, melainkan lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan *principal*. Hal ini menghindarkan adanya konflik kepentingan antara *steward* dengan *principal* yang menjalankan fungsi eksekutif organisasi.

*Steward* juga akan lebih mementingkan kredibilitas atau kepercayaan publik. Prinsip dasar yang digunakan adalah *steward* merasa memiliki tanggungjawab yang besar dalam hal pengelolaan dan pengalokasian sumber daya yang ada secara bijaksana dan hati-hati untuk melaksanakan pelayanan kebutuhan masyarakat luas, sehingga mereka tidak termotivasi untuk memenuhi keinginan pribadi, tetapi dengan memenuhi kebutuhan masyarakat luas maka *steward* merasa bahwa terpenuhinya aktualisasi diri dengan meningkatnya kepercayaan publik.

Jadi, untuk meningkatkan kepercayaan publik, maka pihak pemerintah harus meningkatkan akuntabilitas. Akuntabilitas

---

<sup>44</sup> Hulfi Kurnia Putri Fitrotul Kamila, "Akuntabilitas Penyaluran Dana Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (Studi Pada Desa Kabuaran, Kecamatan Kunir, Lumajang)" (Skripsi, Universitas Jember, 2022), 31.

merupakan pertanggungjawaban mengenai misi organisasi yang telah dilaksanakan. Hal ini berarti suatu organisasi yang memiliki akuntabilitas tinggi maka organisasi tersebut telah mencapai misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian akuntabilitas sesuai dengan teori *stewardship*, dimana dalam teori tersebut menjelaskan bahwa pada hakikatnya manusia mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, dapat dipercaya, berintegritas tinggi dan memiliki kejujuran.

Sehingga jika teori *Stewardship* dikaitkan dengan PKH, maka PKH sebagai program yang dibuat pemerintah diharapkan dapat disalurkan kepada yang berhak menerimanya, serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dapat dipercaya, dan jujur.<sup>45</sup>

## B. Akuntabilitas

### 1. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kepada semua pihak yang berkepentingan atas informasi mengenai kinerja dan perilaku individu atau badan hukum atau pimpinan organisasi.<sup>46</sup> Cendon melihat Akuntabilitas sebagai tanggung jawab yang mengacu pada kewajiban umum pejabat untuk memberikan informasi, penjelasan dan atau pembenaran kepada otoritas internal atau eksternal, memberikan laporan untuk kegiatan mereka dan akan dikenakan penilaian atau evaluasi. Terdapat 4 jenis akuntabilitas menurut Cendon yaitu akuntabilitas politik, akuntabilitas administratif, akuntabilitas professional, dan akuntabilitas demokrasi.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Fani Rahmawati, "Akuntabilitas Penyaluran Dana Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan" (Skripsi, Syariah, IAIN Surakarta, 2020), 11.

<sup>46</sup> Nurlinda, "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa," *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Vol.6 No.1 (2018): 2, <https://doi.org/10.17509/jrak.v6i1.10303>.

<sup>47</sup> Yuni Aliyatul Rohmah, "Analisis Akuntabilitas Program Keluarga Harapan (Studi Deskriptif Akuntabilitas Administratif Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan Di Kecamatan Semampir Surabaya)," *Jurnal Aplikasi Administrasi*, Vol.18 (Mei 2015): 3, <https://doi.org/10.30649/aamama.v18i1.27>.

Akuntabilitas menurut Nurlinda, adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.<sup>48</sup> Sedangkan Mardiasmo mengungkapkan bahwa akuntabilitas publik merupakan tanggung jawab atau kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) kepada pihak pemberi amanah (*pricipal*) dalam mempertanggungjawabkan, menyajikan, memberikan pelaporan serta pengungkapan segala aktivitas dan kegiatan.<sup>49</sup>

Dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas adalah dimana kualitas performannya menyelesaikan tujuan yang menjadi tanggung jawab atau dalam bentuk pertanggungjawaban. Seperti yang telah dijabarkan dari beberapa definisi tersebut menurut Mardiasmo, menjelaskan terdapat lima dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik yaitu:

- a. Akuntabilitas Keuangan, Akuntabilitas keuangan terkait dengan penghindaran penyalahgunaan dana publik.
- b. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum, akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan dengan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.
- c. Akuntabilitas Proses, akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administasi.

---

<sup>48</sup> Nurlinda, "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa", *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Vol.6 No.1 (2018): 2, <https://doi.org/10.17509/jrak.v6i1.10303>.

<sup>49</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2009),

- d. Akuntabilitas Program, akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
- e. Akuntabilitas Kebijakan, akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban Pemerintah, baik Pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.<sup>50</sup>

Sedangkan menurut Baiq Nurrizkiana, Lilik Handayani dan Erna Widiastuty, indikator akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pertanggungjawaban dana publik, salah satu tujuan laporan keuangan pemerintah adalah menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayanya.
- b. Jenis dan bentuk laporan keuangan, laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas.
- c. Penyajian tepat waktu, salah satu upaya konkret untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah melalui penyampaian laporan keuangan yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun sesuai peraturan yang berlaku.
- d. Pemeriksaan, tersedianya laporan pemeriksaan pelaksanaan program.
- e. Respon yang cepat, setelah menerima hasil atas laporan keuangan, maka pihak pembuat laporan harus merespon dengan cepat terkait kelemahan-kelemahan yang telah ditemukan.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Fani Rahmawati, "Akuntabilitas Penyaluran Dana Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan," (Skripsi, Syariah, IAIN Surakarta, 2020), 25.

<sup>51</sup>Baiq Nurrizkiana, Lilik Handayani, Erna Widiastuty," Determinan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Implikasinya

## 2. Akuntabilitas dalam Perspektif Islam

Teori akuntabilitas Islam mengatakan akuntabilitas terbagi menjadi dua bagian yaitu akuntabilitas vertical (*hablumminallah*) dan akuntabilitas horizontal (*hablumminannas*). Dalam konsep islam, akuntabilitas bukan hanya dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan hukum akuntabilitas, melainkan memiliki tujuan lain, yaitu untuk memenuhi hubungan dengan sang pencipta alam semesta. Selain itu dalam konsep Islam, tidak ada perbedaan dalam cara menunjukkan akuntabilitas kepada sang Khalik dan makhluknya karena akuntabilitas kepada Sang Khalid ditafsirkan juga sebagai akuntabilitas kepada masyarakat.<sup>52</sup>

Pengertian akuntabilitas dalam segi akuntansi, akuntabilitas adalah upaya dalam aktivitas untuk menghasilkan pengungkapan yang benar melalui proses-proses akuntansi. Pertanggungjawaban pengungkapan tersebut ditujukan kepada Allah SWT dan manusia. Pengungkapan pertanggungjawaban kepada manusia dapat melalui laporan pertanggungjawaban baik berupa laporan keuangan maupun Laporan pelaksanaan kegiatan lainnya. Akuntabilitas juga terkait dengan peran sosial dimana *Muhtasib* (Akuntan) yakin bahwa hukum syariah telah dilaksanakan dan kesejahteraan umat menjadi tujuan utama dari aktivitas perusahaan dan tujuan tersebut telah tercapai. Selanjutnya yang menjadi indikator pelaksana akuntabilitas dalam perspektif Islam adalah:

- a. Segala aktivitas harus memperhatikan dan mengutamakan kesejahteraan umat sebagai perwujudan amanah yang diberikan Allah SWT kepada manusia sebagai khalifah.
- b. Aktivitas organisasi dilaksanakan dengan adil.

---

Terhadap Kepercayaan Public-Stakeholders,” *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol.18 No.1 (Januari 2017): 35, <https://doi.org/10.18196/jai.18159>.

<sup>52</sup> Achi Rinaldi, Yulistia Devi, “Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Kepercayaan Muzakki Pada Lembaga Pengelola Zakat Dengan Akuntabilitas dan Transparansi Sebagai Variabel Intervening,” *Al-Mal: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, Vol. 3 No. 1 (2022): 94, <https://doi.org/10.24042/al-mal.v3i1.11428>.

c. Aktivitas organisasi tidak merusak lingkungan sekitar.<sup>53</sup>

Seperti firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 58, yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا  
بَصِيرًا [سورة النساء، ٥٨]

*“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”* (Q.S. An-Nisa [4]: 58)

Menurut pandangan Islam juga terdapat konsep amanah yang menuntut adanya pertanggungjawaban karena semua yang ada di dunia ini hanyalah titipan dari Allah kepada manusia sebagai khalifah di bumi dan di akhirat kelak harus dipertanggungjawabkan.<sup>54</sup>

### 3. Keterkaitan Akuntabilitas dan Program Keluarga Harapan (PKH)

Akuntabilitas merupakan wujud pertanggungjawaban pimpinan atas keputusan dan hasil yang dicapai sesuai wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola program keluarga harapan dengan prinsip

<sup>53</sup> Ahmad Syafiq, “Urgensi Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat,” *Ziswaf Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 3 No. 1 (2016): 28, <http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v3i1.2281>.

<sup>54</sup> Abdul Manan, “Analisis Penerapan Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Dan Transparansi Dana Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pekon Srimenganten Di kecamatan Pulau Pangung, Kabupaten Tanggamus)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), 23.

*good corporate governance.*

Program keluarga harapan (PKH) harus dilakukan secara transparansi dan akuntabel. Suatu akuntabilitas sangat diperlukan dalam PKH untuk mencegah terjadinya korupsi, dan dapat mewujudkan prinsip *good governance*. Antonio Bar Cendon melihat Akuntabilitas sebagai tanggung jawab yang mengacu pada kewajiban untuk memberikan informasi, penjelasan dan atau pembenaran kepada otoritas internal atau eksternal, memberikan laporan dalam kegiatan program keluarga harapan (PKH) dan akan dikenakan penilaian atau evaluasi.<sup>55</sup>

Dalam pelaksanaan sebuah program keluarga harapan (PKH), instansi pemerintah memang diwajibkan untuk menginformasikan pelaksanaan kegiatan program kepada publik/masyarakat dengan baik, memenuhi kewajiban masyarakat KPM dengan menyalurkan dana PKH tepat waktu, tepat sasaran dan sesuai dengan porsi yang telah ditetapkan serta mendampingi masyarakat KPM dalam penerimaan PKH mengingat tidak semua KPM bisa menggunakan sistem digital ini untuk itu perlunya sosialisasi berupa edukasi mengenai prosedur sistem digital agar terwujudnya transparansi dan akuntabel.<sup>56</sup> Dengan adanya motivasi dalam bekerja, maka diharapkan pertanggungjawaban ini lebih meningkat dengan intensitas dan arah yang lebih baik untuk mencapai tujuan dari Program Keluarga Harapan.

Dalam hal mempertanggung jawabkan kewenangannya inilah aparat pemerintah maupun penyelenggara PKH dituntut untuk menajalankan asas-asas akuntabilitas kinerja

---

<sup>55</sup> Akhira Rahmadhani, "Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Meningkatkan Akuntabilitas (Studi Pada Ppkh Kampung Pisang Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam)" (Skripsi, IAIN Bukittinggi, 2021), 25.

<sup>56</sup> Yuni Aliyatul Rohmah, "Analisis Akuntabilitas Program Keluarga Harapan (Studi Deskriptif Akuntabilitas Administratif Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan Di Kecamatan Semampir Surabaya)," *Jurnal Aplikasi Administrasi*, Vol. 18 (Mei 2015): 2, <https://doi.org/10.30649/aamama.v18i1.27>.

yang sesuai Inpres Nomor 7 Tahun 1999 bahwa akuntabilitas kinerja adalah “Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan”. Akuntabilitas kinerja ini dilaksanakan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah melakukan akuntabilitas kinerja masing-masing sebagai bentuk pertanggung jawaban dalam pencapaian tujuan organisasi sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam bentuk hasil kinerja. Pelaksanaanya di dasarkan INPRES Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, instansi pemerintah harus mengembangkan mekanismenya serta bertanggung jawab yang tepat, jelas, dan terukur dengan mengacu pada rencana.<sup>57</sup>

Untuk mencapai akuntabilitas dalam penyelenggaraan program keluarga harapan maka diperlukan sebuah sistem yang bisa mendukung jalan dari program ini. Sistem informasi akuntansi merupakan seperangkat prosedur yang mempunyai tujuan menghasilkan informasi yang tepat dan berguna bagi semua pihak, informasi diperoleh dari pengumpulan dan pemrosesan data yang dapat digunakan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Peranan sistem informasi akuntansi terhadap kemajuan lembaga PPKH sangat dibutuhkan. Dengan dukungan sistem informasi yang baik maka sebuah program keluarga harapan (PKH) akan berjalan dengan baik. Teknik dalam sistem informasi akuntansi biasanya menggunakan *Flowchart*

---

<sup>57</sup> Yogi Ade Supratman, “Akuntabilitas Kinerja Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Tapung Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tidak Diterbitkan), 1-2.

(bagan alur). Bagan alur (*flowchart*) inilah yang menunjukkan arus data dan tahapan operasi dari satu bagian ke bagian lain yang terdiri dari beberapa prosedur dalam sebuah sistem.

Tujuan dan manfaat penerapan sistem informasi akuntansi berdasarkan standar akuntansi pemerintahan adalah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelola keuangan dalam menyelenggarakan pelaksanaan program keluarga harapan (PPKH) melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi.<sup>58</sup>

Hubungan akuntabilitas dengan program keluarga harapan selain sebagai wujud pertanggungjawaban atas program PKH juga sebagai bentuk pengawasan suatu penugasan. Pengawasan membantu penilaian apakah perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia dan pengarahan telah dilakukan secara efektif.<sup>59</sup>

Tujuan pengawasan ini hanya merupakan dorongan dalam pelaporan pertanggungjawaban. Pengawasan secara sistematis dapat menetapkan standar pelaksanaan program keluarga harapan yang terencana dan dapat membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang ditetapkan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi untuk menjamin semua sumber daya digunakan secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> Dwi Sulistiani, "Peningkatan Akuntabilitas Publik Melalui Sistem Informasi Akuntansi pada Pondok Pesantren Salafiyah", *Jurnal Ilmu Akuntansi* Vol. 12 No. 2 (2019): 240, <https://doi.org/10.15408/akt.v12i2.9662>.

<sup>59</sup> Akhira Rahmadhani, "Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Meningkatkan Akuntabilitas (Studi Pada Ppkh Kampung Pisang Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam)" (Skripsi, IAIN Bukittinggi, 2021), 28.

<sup>60</sup> Rufaida Azizah, "Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Akuntabilitas (Studi Pada Pelaksanaan Keluarga Harapan (PPKH) di Kecamatan Pagelaran)" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, tidak diterbitkan, 2018), 17-18.

## C. Sistem Informasi Akuntansi

### 1. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

Sistem merupakan dua atau lebih komponen yang saling terkait dan berinteraksi untuk mencapai tujuan, yang terdiri dari subsistem yang mendukung sistem yang lebih besar. Informasi adalah sebuah data yang dikelola dan diproses untuk memberikan arti dan memperbaiki pengambilan keputusan. Akuntansi adalah proses identifikasi, pengumpulan, dan penyimpanan data serta proses pengembangan, pengukuran, dan komunikasi informasi.<sup>61</sup>

Sistem informasi akuntansi adalah suatu kegiatan mengelompokkan, menggolongkan, mencatat dan memproses kegiatan bisnis perusahaan dalam pelaporan keuangan sebagai suatu informasi bagi manajemen dan pihak lainnya.<sup>62</sup> Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi Akuntansi adalah sistem informasi utama organisasi dalam mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses akuntansi dan data lain untuk menghasilkan informasi bagi pembuat keputusan.<sup>63</sup>

### 2. Fungsi Sistem Informasi Akuntansi

Fungsi sistem informasi akuntansi menurut Marshall B. Romney dan Paul John Steinbart menyatakan Sistem Informasi Akuntansi mempunyai tiga fungsi penting yaitu:

- a. Mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi, sumber daya yang dipengaruhi oleh aktivitas-aktivitas dan beberapa orang yang terlibat dalam berbagai aktivitas.

---

<sup>61</sup> Marsall B. Romney, Paul John Steinbart, *Sistem Informasi Akuntansi* (Jakarta: Salemba Empat, 2015), 12.

<sup>62</sup> Irma Paramita Sofia, "Modul Sistem Informasi Akuntansi" (Skripsi, Universitas Pembangunan Jaya, 2018), 3.

<sup>63</sup> Faujan Otinu dkk, "Analisis Sistem Informasi Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Internal Persediaan Barang Pada Toko Campladean Manado," *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, Vol. 12 No. 1 (2017): 169, <https://doi.org/10.32400/gc.12.01.17202.2017>.

Diharapkan pihak manajemen, pegawai, dan beberapa pihak luar yang berkepentingan dapat meninjau ulang hal-hal tersebut.

- b. Mengubah data menjadi informasi yang berguna bagi pihak manajemen untuk membuat keputusan dalam aktivitas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
- c. Menyediakan pengendalian yang memadai untuk menjaga aset-aset organisasi. Termasuk data organisasi, untuk memastikan bahwa data tersebut tersedia saat dibutuhkan.<sup>64</sup>

### 3. Tujuan Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Mulyadi, tujuan sistem informasi akuntansi ada empat diantaranya :

- a. Memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan internal, yang berfungsi untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaan perusahaan memperbaiki tingkat keandalan (reliability) informasi akuntansi.
- b. Menyediakan informasi berbentuk laporan (hasil) kinerja manajemen perusahaan bagi pengelolaan kegiatan usaha.
- c. Memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, baik informasi mengenai mutu, ketepatan penyajian informasi maupun struktur informasinya.
- d. Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi.

Berbeda pendapat dan pandangan menurut Hall tujuan Sistem Informasi Akuntansi ada tiga diantaranya :

- a. Mendukung fungsi kepengurusan (*stewardship*) manajemen suatu badan/organisasi perusahaan karena semua hal yang terkait dengan informasi pengaturan dan

---

<sup>64</sup> Marsall B. Romney, Paul John Steinbart, *Sistem Informasi Akuntansi*, 11.

penggunaan sumber daya organisasi guna mencapai tujuan organisasi merupakan tanggungjawab manajemen perusahaan.

- b. Mendukung pengambilan keputusan oleh manajemen, karena sistem informasi akuntansi memberikan informasi yang diperlukan oleh pihak manajemen untuk pengambilan kebijakan perusahaan.
- c. Sistem informasi akuntansi dapat membantu personil operasional untuk bekerja lebih efektif dan efisien karena sistem ini mendukung seluruh kegiatan operasi perusahaan.<sup>65</sup>

#### 4. Elemen-elemen Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Romney dan Poul sistem informasi akuntansi memiliki enam elemen yaitu :

- a. Orang-orang yang berfungsi untuk mengoperasikan dan melaksanakan sistem dengan berbagai fungsi.
- b. Prosedur yang dilakukan baik secara manual atau otomatis untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas suatu organisasi.
- c. Data mengenai sebuah aktivitas yang dilakukan mengenai proses-proses kegiatan organisasi.
- d. Software yang digunakan untuk memproses data organisasi
- e. Infrastruktur Teknologi Informasi merupakan peralatan yang mendukung dalam pengolahan data dan peralatan untuk komunikasi jaringan.
- f. Pengendalian internal dan Pengukuran keamanan yang menyimpan data SIA.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> James A Hall, *Sistem Informasi Akuntansi Accounting Information Systems* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 20.

<sup>66</sup> Marsall B. Romney, Paul John Steinbart, *Sistem Informasi Akuntansi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2020), 11.

## 5. Komponen Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Bayu Anggoro, Fikri Hamidy dan Ade Dwi Putra, komponen dari Sistem Informasi Akuntansi adalah sebagai berikut:

### a. Input

Sebuah data transaksi yang dikumpulkan dan dimasukkan sebagai input kedalam sistem untuk menghasilkan sebuah informasi keuangan maupun informasi non keuangan.

### b. Proses

Sebuah data transaksi yang telah dikumpulkan lalu di analisis untuk menghasilkan sebuah informasi

### c. Output

Output pada sistem informasi akuntansi berupa sebuah laporan keuangan dan laporan internal seperti arus kas, piutang, dan anggaran.

### d. Penyimpanan Data

Data harus selalu disimpan karena akan dibutuhkan di masa akan datang. Data yang tersimpan harus diperbaharui untuk menjaga keterkinian data.<sup>67</sup>

## 6. Indikator Sistem Informasi Akuntansi

Menurut DeLone dan Mclean variabel keberhasilan penerapan sistem informasi akuntansi dapat diukur melalui komponen keberhasilan sistem informasi yaitu:

### a. Kualitas Sistem

Kualitas sistem adalah kualitas perangkat lunak akuntansi yang digunakan dilihat dari persepsi pemakai.

### b. Kualitas Informasi

Nilai dari sebuah informasi yang menghasilkan keandalan keputusan, dapat dipengaruhi oleh kualitas yang melekat pada informasi.

---

<sup>67</sup> Bayu Anggoro, Fikri Hamidy, dan Ade Dwi Putra, "Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus: Desa Isorejo Kec. Bunga Mayang Kab. Lampung Utara)," *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi Akuntansi (JIMASIA)*, Vol. 2 No. 2 (Desember 2022): 57, <https://doi.org/10.33365/jimasia.v2i2.2013>.

c. Kualitas Layanan

Kualitas layanan merupakan kualitas dukungan yang diterima pengguna sistem dari departemen sistem informasi.

d. Kepuasan Pengguna

Kepuasan pengguna merupakan respon dari penerima terhadap penggunaan output dari sistem informasi akuntansi.<sup>68</sup>

7. Keterkaitan Sistem Informasi Akuntansi dan Program Keluarga Harapan (PKH)

Sistem informasi akuntansi merupakan kumpulan sumber daya seperti manusia dan peralatan yang diatur untuk mengubah data menjadi informasi. Informasi ini dikomunikasikan untuk pengambilan keputusan. Sistem ini berguna untuk setiap organisasi dalam pengambilan keputusan untuk mewujudkan tujuan.

Hubungan informasi akuntansi dengan PKH terbagi dua yaitu secara eksternal dan internal. Informasi akuntansi pada lingkup internal di PKH beragam tergantung pada tingkatannya didalam organisasi atau fungsi yang mereka jalankan seperti informasi akuntansi untuk ketua koordinator program keluarga harapan berfungsi sebagai perencanaan dan pengendalian jangka panjang.

Informasi akuntansi pada lingkup eksternal di PKH mencakup pemerintah, serikat pekerja kecamatan, serikat pekerja desa, serikat pekerja dan masyarakat secara keseluruhan yang berfungsi untuk menerima dan keluaran dari sistem informasi akuntansi suatu organisasi. Sebagai keluaran biasanya lebih bersifat rutin yang diperuntukkan pada masyarakat, seperti masyarakat menerima dana bantuan per 3 bulan dan melakukan kegiatan rutin dalam program PKH. Sedangkan untuk menerima lebih diperuntukkan pada

---

<sup>68</sup> William H. DeLone and Ephraim R. McLean, "Information Systems Success Measurement," *Foundations and Trends in Information Systems*, Vol. 2 No. 1 (2016): 6, <http://dx.doi.org/10.1561/29000000005>.

pemerintah, kecamatan, desa, staf pekerja mengenai bukti-bukti transaksi, laporan keuangan, dan memperoleh masukan lain mengenai program keluarga harapan.<sup>69</sup>

#### **D. Program Keluarga Harapan (PKH)**

##### **1. Pengertian Program Keluarga Harapan**

PKH merupakan salah satu program perlindungan sosial di Indonesia dalam bentuk bantuan sosial. Bantuan ini diberikan kepada keluarga miskin dan rentan miskin dengan persyaratan tertentu dimana mereka terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). PKH merupakan salah satu upaya pemerintah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan secara khusus bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Program perlindungan sosial atau dikenal didunia internasional dengan *Conditional Cash Transfer*. Sejak diluncurkan pada tahun 2007, PKH telah berkontribusi dalam menekan angka kemiskinan dan mendorong kemandirian penerima bansos, yang selanjutnya disebut keluarga penerima manfaat (KPM).<sup>70</sup>

Bantuan tunai bersyarat yakni sebuah program keluarga harapan (PKH) memiliki ketentuan dalam memberikan bantuan sosial kepada keluarga penerima manfaat diantaranya merupakan keluarga sangat miskin (KSM) dan tercatat di dalam basis data terpadu hasil pendapatan program perlindungan sosial (PPLS) yang dikelola oleh tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan (TNP2K). Para penerima bantuan sedikitnya harus memenuhi kriteria kepesertaan program yaitu memiliki ibu hamil /nifas/anak balita, memiliki anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan dasar (anak pra-sekolah), anak usia 7 sampai 12

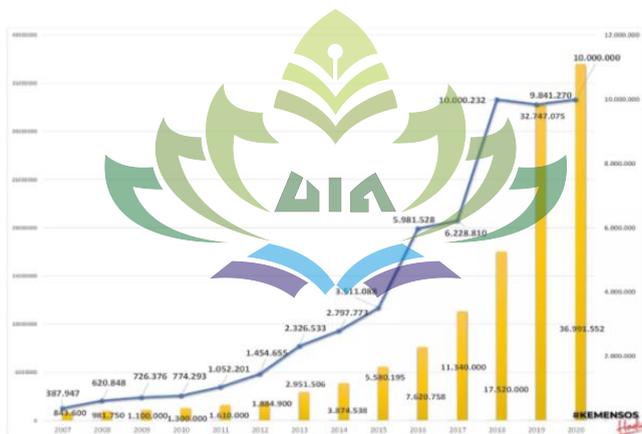
---

<sup>69</sup> Rufaida Azizah, “Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Akuntabilitas (Studi Pada Pelaksanaan Keluarga Harapan (PPKH) Di Kecamatan Pagelaran” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), 13.

<sup>70</sup> Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan(PKH)* (Kementrian Sosial RI, 2021), 7.

tahun, anak usia 12 sampai 15 tahun, anak usia 15 sampai 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar termasuk anak disabilitas, dan para lanjut usia dimulai dari 60 tahun.<sup>71</sup>

Sejak diluncurkan pada tahun 2007, jumlah KPM PKH meningkat secara bertahap. PKH dilaksanakan secara berkelanjutan yang dimulai pada tahun 2007 di 7 Provinsi, sampai dengan tahun 2020 PKH sudah dilaksanakan di 34 Provinsi dan mencakup 514 Kabupaten/Kota dan 6.709 Kecamatan. Perkembangan jumlah penerima dan alokasi anggaran PKH sejak tahun 2007 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada gambar 2.1.



Gambar 2.1

Data Perkembangan Jumlah Penerima PKH tahun 2007-2020

Pada Pembangunan Jangka Panjang (PJP) tahun 2010-2014 terjadi peningkatan target penerima manfaat dan alokasi anggaran PKH, melampaui baseline target perencanaan. Jumlah penerima PKH tahun 2016 adalah sebanyak 6 juta KPM dengan anggaran sebesar Rp. 10 triliun. Kemudian pada tahun 2017, KPM PKH meningkat menjadi 6.228.810

<sup>71</sup> Zuhendra dan Atika Sari Devi, "Sistem Akuntansi Pencairan dan Penyaluran Dana Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Dinas Sosial Kota Padang," *Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang (JAAIP)*, Vol. 1 No. 2 (2021): 98, <https://doi.org/10.31933/jaaip.v1i2.407>.

keluarga dengan anggaran bantuan sosial sebesar Rp. 11,5 triliun. Pada tahun 2018, terjadi peningkatan target jumlah KPM PKH yang cukup signifikan menjadi 10 juta KPM dengan realisasi 10.000.232 keluarga dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 19,4 triliun. Pada akhir tahun 2019, terjadi penurunan jumlah KPM menjadi 9.841.270 keluarga dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 34,2 triliun. Pada tahun 2020 capaian sebanyak 10.000.000 keluarga dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 36,9 triliun.<sup>72</sup>

Dengan adanya Program Keluarga Harapan diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengubah pandangan, sikap, serta perilaku untuk mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan yang layak dengan harapan dapat memutus rantai kemiskinan.

2. Tujuan Program Keluarga Harapan  
Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki tujuan sebagai berikut:
  - a. Meningkatkan taraf hidup KPM melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
  - b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.
  - c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial.
  - d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.
  - e. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada KPM.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan(PKH)*, 22.

<sup>73</sup> Zuhendra dan Atika Sari Devi, "Sistem Akuntansi Pencairan dan Penyaluran Dana Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Dinas Sosial Kota Padang," *Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang (JAAIP)*, Vol. 1 No. 2 (2021): 93, <https://doi.org/10.31933/jaaip.v1i2.407>.

### 3. Manfaat Program Keluarga Harapan

Program keluarga harapan diterapkan guna untuk memberikan akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan dan pendampingan termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program 20 komplementer secara berkelanjutan. PKH juga diarahkan sebagai penanggulangan kemiskinan yang memberikan sinergi dalam berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional. Tidak hanya itu PKH juga mulai di dorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden Republik Indonesia.<sup>74</sup>

### 4. Sasaran Program Keluarga Harapan

Sasaran dari program PKH ini yakni keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial yang berada di wilayah:

- a. Pesisir dan pulau-pulau kecil
- b. Daerah tertinggal atau terpencil
- c. Perbatasan Negara.<sup>75</sup>

### 5. Hak dan Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH

#### a. Hak KPM PKH

KPM PKH berhak mendapatkan:

- 1) Bantuan sosial PKH;

---

<sup>74</sup> Rufaida Azizah, "Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Akuntabilitas (Studi Pada Pelaksanaan Keluarga Harapan (PPKH) di Kecamatan Pagelaran)" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, tidak diterbitkan, 2018), 19-20.

<sup>75</sup> Akhira Rahmadhani, "Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Meningkatkan Akuntabilitas (Studi Pada Ppkh Kampung Pisang Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam)" (Skripsi, IAIN Bukit Tinggi, 2021), 33.

- 2) Pendampingan sosial PKH;
- 3) Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial; dan
- 4) Program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

b. Kewajiban KPM PKH

Kewajiban KPM PKH pada kondisi normal terdiri dari:

- 1) Komponen Kesehatan terdiri dari ibu hamil/nifas/menyusui/, (anak usia dini 0-6 tahun) yang belum bersekolah wajib memeriksakan kesehatan pada fasilitas/layanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan;
- 2) Komponen Pendidikan terdiri dari anak usia sekolah wajib belajar 12 tahun, wajib mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif;
- 3) Komponen Kesejahteraan Sosial terdiri dari lanjut usia dan/atau penyandang disabilitas berat, wajib mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan yang dilakukan minimal setahun sekali;
- 4) KPM hadir dalam pertemuan kelompok atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) setiap bulan;<sup>76</sup>

6. Kriteria Penerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan

Kriteria komponen penerima bantuan sosial PKH adalah sebagai berikut :

- a. Komponen kesehatan akan menerima anggaran bantuan sebesar Rp. 3.000.000 per tahun dengan kriteria komponen kesehatan meliputi :
  - 1) Ibu hamil/menyusui

---

<sup>76</sup> Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)*, 26.

- 2) Anak berusia 0 sampai dengan 6 tahun.
  - b. Komponen pendidikan akan menerima anggaran bantuan dengan kriteria komponen pendidikan meliputi :
    - 1) Anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat sebesar Rp. 900.000
    - 2) Anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat Rp. 1.500.000
    - 3) Anak sekolah menengah/madrasah aliyah atau sederajat Rp. 2.000.000
    - 4) Anak usia 6 sampai dengan 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.
  - c. Komponen kesejahteraan sosial akan menerima anggaran bantuan sebesar Rp.2.400.000 pertahun dengan kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi :
    - 1) Lanjut usia mulai dari 60 tahun
    - 2) Penyandang Disabilitas lebih diutamakan penyandang disabilitas berat.<sup>77</sup>
7. Alur Kerja Pelaksanaan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan
- Proses pelaksanaan PKH terdiri dari beberapa tahapan, antara lain:
- a. Perencanaan
  - b. Pertemuan Awal dan Validasi
  - c. Penetapan KPM PKH
  - d. Penyaluran Bantuan Sosial
  - e. Pemutakhiran Data
  - f. Verifikasi Komitmen
  - g. Pendampingan; dan
  - h. Transformasi Kepesertaan.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Muhsin Efendi, Hasan Basri, dan Subhan AB, "Implementasi Pelayanan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah," *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, Vol. 2 No. 11 (2021): 80, <https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/492>.

<sup>78</sup> Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)*, 24.

## 8. Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan

Mekanisme penyaluran dana bantuan sosial PKH secara non tunai meliputi:

- a. Pembukaan rekening penerima bantuan sosial
- b. Sosialisasi dan edukasi
- c. Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)
- d. Proses penyaluran bantuan sosial PKH
- e. Penarikan dana bantuan sosial PKH
- f. Rekonsiliasi hasil penyaluran dana bantuan sosial PKH
- g. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyaluran bantuan sosial.<sup>79</sup>



---

<sup>79</sup> Fani Rahmawati, "Akuntabilitas Penyaluran Dana Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan" (Skripsi, Syariah, IAIN Surakarta, 2020), 16.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan penelitian tentang Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Dana Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Akuntabilitas Ditinjau Dari Perspektif Akuntansi Syariah (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat), dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dengan implementasi sistem informasi akuntansi pengelolaan dana program keluarga harapan dapat meningkatkan akuntabilitas pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat, yang ditunjukkan dengan tercapainya indikator akuntabilitas yaitu pertanggungjawaban dana publik, jenis dan bentuk Laporan keuangan, penyajian tepat waktu, pemeriksaan dan respon yang cepat pada Dinas Sosial sebagai lembaga penyelenggara program keluarga harapan. Serta dengan adanya sistem informasi akuntansi dapat memudahkan dinas sosial dalam mendata calon penerima bantuan, penyaluran dana hingga pembuatan Laporan pertanggungjawaban menjadi lebih akurat dan cepat serta dapat meminimalisir terjadi salah saji atas Laporan yang disajikan. Dan data yang dihasilkan dengan penerapan sistem informasi akuntansi bisa membantu dinas sosial dalam pengambilan keputusan untuk menentukan penerima bantuan program keluarga harapan, serta Laporan pertanggungjawaban bisa dijadikan bahan evaluasi dan pengawas untuk mencegah adanya penyelewengan.
2. Akuntabilitas dalam perspektif Islam tidak hanya ditujukan kepada masyarakat (*Stakeholders*) dalam tataran horizontal melainkan juga pertanggungjawaban vertikal yaitu kepada Allah SWT. Akuntabilitas pengelolaan dana program keluarga harapan pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat telah sesuai dengan perspektif Islam. Dimana dengan tercapainya indikator akuntabilitas yaitu aktivitas pengelolaan dana program keluarga harapan Dinas Sosial selalu mengutamakan

kepentingan masyarakat penerima bantuan, berlaku adil dalam mendata calon peserta program keluarga harapan sehingga bisa tepat sasaran, dan dalam aktivitas pengelolaan dana program keluarga harapan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat selalu memperhatikan lingkungan sekitar.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada dinas sosial dalam proses penyaluran dana kedepannya dapat menggunakan *software* dan memperbaiki pengendalian internal dan pengukuran keamanan sehingga data yang dihasilkan menjadi lebih mudah, cepat dan akurat.
2. Diharapkan pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat dapat mempertahankan serta meningkatkan akuntabilitas Islam dalam pengelolaan dana program keluarga harapan, sehingga pertanggungjawaban pengelolaan dana bantuan bisa tepat sasaran, tepat waktu dan sesuai dengan porsi yang telah ditetapkan.

## DAFTAR RUJUKAN

### **Al-Qur'an**

Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* Depok: Cahaya Qur'an, 2008.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Special For Woman* Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007

### **Buku**

A James Hall, *Sistem Informasi Akutansi Accounting Information Systems* Jakarta: Salemba Empat, 2011.

Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)* (Kementrian Sosial RI, 2021).

Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* Yogyakarta: Penerbit Andi, 2009.

Margono S, *Metodologi Penelitian Pendidikan* Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Muhadjir Noeng, *Metodologi Peneltian Kualitatif* Yogyakarta: Rake Sirasi, 2010.

Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* Jakarta: Grasindo, 2012.

Purhantara Wahyu, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Romney Marsall B., Paul John Steinbart, *Sistem Informasi Akuntansi* Jakarta: Salemba Empat, 2020.

Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis* Bandung: Alfabeta, 2010.

Sugiyono, *Metode Kualitatif* Bandung: CV Alfabeta. 2015.

Suyanto, *Metode Penelitian Sosial* Jakarta: Kencana Prenanda Media Grup, 2011.

Teguh Muhammad , *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Praktek* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Tungga Anata Wikrama, Dkk, *Metode Penelitian Bisnis* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014

## **Jurnal**

Anggoro Bayu, Fikri Hamidy, dan Ade Dwi Putra, "Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus: Desa Isorejo Kec. Bunga Mayang Kab. Lampung Utara," *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi Akuntansi (JIMASIA)*, Vol. 2 No. 2 (Desember 2022): 57, <https://doi.org/10.33365/jimasia.v2i2.2013>

Annisa Syerlie, Juwita Azizah, and Leonard Tambunan, "Perancangan dan Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Web Dalam Upaya Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas," *SATIN-Sains dan Teknologi Informasi* Vol. 7 No. 2 (2021): 44-52, <https://doi.org/10.33372/stn.v7i2.756>

Daud Rulfah M Dkk, "Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Kabupaten Bireuen," *JPAK: Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan*, Vol. 10 No. 2 (Juli-Desember 2022): 136, <https://doi.org/10.17509/jpak.v10i2.39913>.

Efendi Muhsin, Hasan Basri, dan Subhan AB, "Implementasi Pelayanan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah," *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, Vol. 2 No. 11 (2021): 80,

<https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/492>.

Juriah, Nur Fadhilah, Ahmad Hasibuan, "Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi kasus Dibidang Fakir Miskin Pada Kantor Dinas Sosial Mandailing Natal)," *JURNAL EMBA REVIEW*, Vol. 2 No. 2 (2022): <https://penerbitadm.com/index.php/JER/>.

Laili Mohammad Khafid, Agustin Fadjarenie, "Pengaruh Sosialisasi Informasi SAK ETAP Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan," *Al-Mal: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, Vol. 2 No. 1 (2021): <https://doi.org/10.24042/al-mal.v2i01.7687>.

Mas'ut dan Abdan Masrura, "Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas pendapatan Pajak Daerah di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Medan," *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM)*, Vol. 5 No. 1 (2018): <https://doi.org/10.30743/akutansi.v5i1>

Mubtadi Novendi Arkham, Gita Paramita Agustin, Dewi Susilowati, "Akuntabilitas dalam Perspektif Akuntansi Syariah (Studi Kasus pada Baznas Kabupaten Kebumen)," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 7 No. 2 (Desember 2017): [http://dx.doi.org/10.21927/jesi.2017.7\(2\).79-89](http://dx.doi.org/10.21927/jesi.2017.7(2).79-89)

Nilamsari Natalina, "Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif," *Wacana*, Vol. 13 No. 2 (2014): 45, <https://doi.org/10.32509/wacana.v13i2.143>

Nurlinda, "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa," *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 6 No. 1 (2018): 2, <https://doi.org/10.17509/jrak.v6i1.10303>.

- Nurritziana Baiq, Lilik Handayani, Erna Widiastuty,” Determinan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Implikasinya Terhadap Kepercayaan Public-Stakeholders,” *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol.18 No.1 (Januari 2017): <https://doi.org/10.18196/jai.18159>
- Otinu Faujan dkk, “Analisis Sistem Informasi Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Internal Persediaan Barang Pada Toko Campladean Manado,” *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, Vol. 12 No. 1 (2017): 169, <https://doi.org/10.32400/gc.12.01.17202.2017>
- Rakhmadani Syeni, "Akuntabilitas Pelayanan Publik: Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Di Era Digital," *Jurnal STISIPOL Dharma Wacana Metro*, (2017): <http://digilib.mercubuana.ac.id/>.
- Ridwan Mahle. Muhammad, Nasirwan, “Akuntabilitas dan Transparansi Berbasis Bagi Hasil (Analisis Terhadap Karyawan Toko Di Toko Beureuneun),” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (j-EBIS)*, Vol. 2 No. 2 (2016): <http://dx.doi.org/10.32505/jebis.v2i2.180>
- Rinaldi Achi, Yulistia Devi, “Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Kepercayaan Muzakki Pada Lembaga Pengelola Zakat Dengan Akuntabilitas dan Transparansi Sebagai Variabel Intervening,” *Al-Mal: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, Vol. 3 No. 1 (2022): 94, <https://doi.org/10.24042/al-mal.v3i1.11428>.
- Rohmah Yuni Aliyatul, "Analisis Akuntabilitas Program Keluarga Harapan (Studi Deskriptif Akuntabilitas Administratif Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan Di Kecamatan Semampir Surabaya)," *Jurnal Aplikasi Administrasi*, Vol.18 (Mei 2015): 3, <https://doi.org/10.30649/aamama.v18i1.27>.

- Setiawati Sri, "Evaluasi Prosedur Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Menilai Efektifitas Dana Pada Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Bina Auladi Depok," *Jurnal Lentera Akuntansi*, Vol. 4 No. 2 (2019): 65, <http://dx.doi.org/10.34127/jrakt.v4i2.304>.
- Stefiana Verni, Dkk, "Tata Kelola Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan Di Desa Malimbong Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat," *Journal Of Public Service, Public Police, And Administration*, Vol. 1 No. 1 (2021): <http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1319>.
- Stefiana Verni, Dkk, "Tata Kelola Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan Di Desa Malimbong Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat," *Journal Of Public Service, Public Police, And Administration*, Vol. 1 No. 1 (2022): 65, <https://journal.unibos.ac.id/jp/article/>
- Sulistiani Dwi, "Peningkatan Akuntabilitas Publik Melalui Sistem Informasi Akuntansi pada Pondok Pesantren Salafiyah," *Jurnal Ilmu Akuntansi*, Vol. 12 No. 2 (2019): 239, <https://doi.org/10.15408/akt.v12i2.9662>.
- Syafiq Ahmad, "Urgensi Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat," *Ziswaf Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 3 No. 1 (2016): <http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v3i1.2281>
- Wahidah Anna Zahrotul, Dkk, "Prosedur Penyaluran Bantuan Sosial Di Era Pandemi Covid-19 Pada Dinas Sosial Kabupaten Blitar," *Competence: Journal of Management Studies*, Vol. 16 No. 1 (April 2022): 51-63, <https://doi.org/10.21107/kompetensi.v16i1.14429>
- Wahyuni Siska, Novita Indrawati, and A. Al Azhar. "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Sistem Informasi Akuntansi, Dan Kompetensi Aparat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Studi Empiris Desa-Desa Di Kabupaten

Rokan Hulu," *Jurnal Ekonomi* Vol. 26 No. 3 (2018): 98-110,  
<http://dx.doi.org/10.31258/je.26.3.p.98-110>

William H. DeLone and Ephraim R. McLean, "Information Systems Success Measurement," *Foundations and Trends in Information Systems*, Vol. 2 No. 1 (2016): 6,  
<http://dx.doi.org/10.1561/29000000005>

Zulhendra dan Atika Sari Devi, "Sistem Akuntansi Pencairan dan Penyaluran Dana Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Dinas Sosial Kota Padang," *Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang (JAAIP)*, Vol. 1 No. 2 (2021):  
<https://doi.org/10.31933/jaaip.v1i2.407>.

### **Skripsi**

Azizah Rufaida, "Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Akuntabilitas (Studi Pada Pelaksanaan Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Pagelaran)" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2018).

Kamila Hulfi Kurnia Putri Fitrotul, "Akuntabilitas Penyaluran Dana Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (Studi Pada Desa Kabuaran, Kecamatan Kunir, Lumajang)" (Skripsi, Universitas Jember, 2022).

Manan Abdul, "Analisis Penerapan Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Dan Transparansi Dana Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pekon Srimenganten Di kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

Marsela Selli, "Sistem Akuntansi Pencairan dan Penyaluran Dana Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) pada Dinas Sosial

Kabupaten Kuantan Singingi", (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020).

Maulida Arum, "Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Di Kantor Kelurahan Desa Kembangan, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak Tahun 2020" (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021).

Rahmadhani Akhira, "Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Meningkatkan Akuntabilitas (Studi Pada Ppkh Kampung Pisang Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam)" (Skripsi, IAIN Bukittinggi, 2021), 25.

Rahmawati Fani, "Akuntabilitas Penyaluran Dana Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan" (Skripsi, Syariah, IAIN Surakarta, 2020).

Ronta Halisa, "Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Di Desa Masolo Kabupaten Pinrang (Analisis Ekonomi Islam)" (Skripsi, IAIN PAREPARE, 2021).

Sofia Irma Paramita, "Modul Sistem Informasi Akuntansi" (Skripsi, Universitas Pembangunan Jaya, 2018).

Supratman Yogi Ade, "Akuntabilitas Kinerja Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Tapung Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tidak Diterbitkan).

### **Sumber Online**

Aripsah, "Penerima PKH di Batuketulis (Lampung Barat) Keluhkan Tarikan Uang Pulsa," Lampost.co, 2018,

<https://www.lampost.co/berita-penerima-pkh-di-batuketulis-lambar-keluhkan-tarikan-uang-pulsa.html>.

Zulkarnain Aditya, “Kacau, Di Duga Ratusan Perangkat Pekon Di Lampung Barat Nikmati Dana PKH,” *Beeoneinfo.Com*, 2020, <http://beeoneinfo.com/kacau-di-duga-ratusan-perangkat-pekon-di-lampung-barat-nikmati-dana-pkh/>.

## **Wawancara**

Aryanti, ”Prosedur penyaluran dana Program Keluarga Harapan”, *Wawancara*, 27 April 2023.

Dewi Rapika, “Alur Pelaksanaan dan Penyaluran PKH”, *Wawancara*, 27 April 2023.

Istanto Ferry, “Bentuk dan Jenis Laporan Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan”, *Wawancara*, 17 Februari 2023.

Istanto Ferry, “Kualitas Sistem Pelaksanaan Program Keluarga Harapan,” *Wawancara*, 17 Februari 2023.

Istanto Ferry, “Penyajian Laporan Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan”, *Wawancara*, 17 Februari 2023.

Istanto Ferry, “Pertanggungjawaban Dana Publik Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan”, *Wawancara*, 17 Februari 2023.

Istanto Ferry, “Prosedur penyaluran dana Program Keluarga Harapan”, *Wawancara*, 17 Februari 2023.

Istanto Ferry, “Respon yang Cepat Pelaporan Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan”, *Wawancara*, 17 Februari 2023.

Julaini Arni, “Persyaratan Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan”, *Wawancara*, 27 April 2023.

Rahleda, “Prosedur Pendataan Calon Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan”, *Wawancara*, 17 Februari 2023.

Wati Rida, “Pencairan Dana Program Keluarga Harapan”, *Wawancara*, 24 Februari 2023.

Yanti El, “Jadwal Pencairan Dana Program Keluarga Harapan”, *Wawancara*, 28 April 2023.

